

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019 - 2024**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019**



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magelang.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah.
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
31. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
32. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
33. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. acuan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
- d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- g. Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- k. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Renstra Dinas Perhubungan;
- p. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- t. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
- v. Renstra Sekretariat Daerah;
- w. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Renstra Kecamatan Salaman;
- y. Renstra Kecamatan Borobudur;
- z. Renstra Kecamatan Ngluwar;
- aa. Renstra Kecamatan Salam;
- bb. Renstra Kecamatan Srumbung;
- cc. Renstra Kecamatan Dukun;
- dd. Renstra Kecamatan Sawangan;
- ee. Renstra Kecamatan Muntilan;
- ff. Renstra Kecamatan Mungkid;
- gg. Renstra Kecamatan Mertoyudan;
- hh. Renstra Kecamatan Tempuran;
- ii. Renstra Kecamatan Kajoran;
- jj. Renstra Kecamatan Kaliangkrik;
- kk. Renstra Kecamatan Bandongan;
- ll. Renstra Kecamatan ...

- pp. Renstra Kecamatan Tegalrejo;
- qq. Renstra Kecamatan Secang;
- rr. Renstra Kecamatan Windusari;
- ss. Renstra Inspektorat;
- tt. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- uu. Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- vv. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

(2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kode Pos 56511 Website: www.magelangkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Drs. ADI WARYANTO.

NIP : 19660304 199203 1 007

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang

Berdasar Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/821/KEP/22/2019 tanggal 6 Agustus 2019, bertugas untuk dan atas nama Sekretariat Daerah berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Rencana Strategis disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas dan fungsi Sekretariat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH



Drs. ADI WARYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19660304 199203 1 007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala hanya karena petunjuk dan rahmat-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019-2024 dapat terselesaikan. Penstra Sekretariat Daerah merupakan salah satu produk perencanaan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Dokumen ini disusun berdasarkan usulan dan masukan dari berbagai unsur dan pemangku kepentingan yang ditujukan untuk mewujudkan Visi Bupati Magelang tahun 2019-2024 yaitu *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah"* (SEDAYA AMANAH) khususnya dalam pelaksanaan Misi ke 3 yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, serta langkah-langkah yang akan diambil dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut untuk lima tahun kedepan.

Kendala yang kami hadapi dalam penyusunan Renstra adalah kurangnya apresiasi terhadap dokumen yang disusun, baik ketepatan waktu, validitas data maupun kelengkapan dokumen, sehingga mempengaruhi kelancaran dan kesempurnaan dalam penyusunan dokumen. Meskipun demikian sudah menjadi komitmen kami untuk menyusun dokumen sebaik mungkin sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam penyusunan Renstra. Kami sangat mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Renstra dan penyusunan dokumen lainnya. Semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019 - 2024 mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Magelang, Aamiin.

Kota Mungkid, 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199203 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
PERATURAN BUPATI	ii	
SURAT PERNYATAAN	viii	
KATA PENGANTAR	ix	
DAFTAR ISI	x	
DAFTAR TABEL	xii	
DAFTAR GRAFIK	xiii	
DAFTAR GAMBAR	xiv	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
	1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG	
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	II-1
	2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	II-8
	2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	II-10
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	II-20
BAB III	ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	III-1
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Magelang	III-7
	3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	III-13
	3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-15
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	V-1

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Sekretariat Daerah	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Berdasarkan Golongan dan Eselon	II-8
Tabel 2.2	Kondisi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.	II-9
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2014-2018.	II-11
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Jenis Pendapatan dan jenis Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2014-2018.	II-15
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Urusan dan Program Pendanaan Perangkat Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.	II-18
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.	III-1
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.	III-5
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	III-11
Tabel 3.4	Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Terkait Dengan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah.	III-14
Tabel 3.5	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan.	III-17
Tabel 3.6	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD terkait Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019 – 2024.	III-18
Tabel 3.7	Pemetaan Isu-isu Strategis Pembangunan Global, Nasional dan Daerah.	III-25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.	IV-3
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.	V-1
Tabel 6.1	Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019-2024.	VI-1
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019-2024	Lamp.1

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2
Tabel 7.3	Cascading Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2014	Lamp. 2
Tabel 7.4	Meta Data Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2014	Lamp. 3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Kondisi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.	II-10
Grafik 2.2	Target Dan Realisasi Pendapatan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.	II-16
Grafik 2.3	Target Dan Realisasi Belanja Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.	II-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.	II-7
------------	--	------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang mengacu kepada RPJPD Kabupaten Magelang, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Magelang menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan di setiap SKPD, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing SKPD. Renstra yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dan bahan penyusunan RKPD.

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap SKPD dalam menjawab tuntutan lingkungan dan perkembangan wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diembannya. Renstra memiliki peran yang sangat penting untuk menuntun SKPD dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki.

Dalam Penyusunannya, Rencana Strategis Perangkat Daerah mendasar pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan melalui tahapan sebagaimana berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir;
- f. Penetapan.

Renstra menjadi kunci yang akan menunjukkan penjabaran kebijakan melalui rencana-rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, karena itu rencana-rencana yang dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata kebijakan yang diambil dapat diketahui pula pencapaiannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel.

Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap warga negara, serta tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik “*Good Governance*” yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian pemerintahan yang baik

adalah pemerintahan yang mampu mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat, baik secara politik, hukum, maupun ekonomi dan di informasikan secara terbuka kepada publik.

Untuk mewujudkan *Clean and Good Governance* merupakan tantangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga keinginan masyarakat terhadap pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi kenyataan. Langkah yang perlu dan harus dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan terlegitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, cara pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun perubahan secara bersama-sama baik perubahan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Magelang memerlukan tenaga yang memiliki kompetensi dan profesionalisme serta kinerja yang tinggi. Seluruh pegawai Sekretariat Daerah (SETDA) harus merespon perubahan lingkungan dan perkembangan wilayah yang demikian cepat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540).
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah sebagai upaya ke depan untuk :

- a. Menjamin keterkaitan, keserasian, harmonisasi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya *sustainability* (kesinambungan) program dari waktu ke waktu;
- c. Menjamin pencapaian target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah agar dimilikinya dokumen perencanaan yang dapat dicapai selama periode tahun 2019-2024 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah maupun lebih jauh dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Rencana Strategis K/L dan Renstra Propinsi
 - 3.3.1. Telaah Renstra Kementrian PANRB dan Kementrian Sekretariat Negara
 - 3.3.2. Telaah Renstra Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

	3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.4.1.	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
	3.4.2.	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Sekretariat Daerah
BAB VIII		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Kedudukan Sekretariat Daerah sebagaimana diatur pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dimana Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur staf dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan fungsinya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana berikut :

- a. Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- b. Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
 - 1) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
 - 2) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 4) Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah;
 - 5) Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
 - 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - 7) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;
 - 8) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah didukung oleh 3 (tiga) asisten dan 8 (delapan) bagian yang memiliki pembagian tugas sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum, pemerintahan umum, kecamatan dan kelurahan, pertanahan, fasilitasi pemilihan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengawasan, hubungan kerja dengan dewan perwakilan rakyat daerah, fasilitasi musyawarah pimpinan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan desa, hukum serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Pemerintahan dibantu 2 (dua) Bagian dengan tugas sebagai berikut :

1) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, perumusan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum, pemerintahan umum, kecamatan dan kelurahan, pertanahan, fasilitasi pemilihan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengawasan, hubungan kerja dengan dewan perwakilan rakyat daerah, fasilitasi musyawarah pimpinan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi di bidang pembentukan produk hukum daerah, penyebarluasan produk hukum, kajian dan evaluasi produk hukum, serta layanan bantuan hukum dan hak azasi manusia serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi urusan pengembangan dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, penanaman modal, pariwisata, perindustrian, koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan, perhubungan, pertanian, peternakan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, pangan dan lingkungan hidup, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan pengelolaan administrasi pembangunan daerah, pengadaan barang/jasa, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, sosial, kesehatan, penanggulangan bencana, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat dibantu 3 (tiga) Bagian dengan tugas sebagai berikut :

1) Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, perumusan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi di bidang pengembangan dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, penanaman modal, pariwisata, perindustrian, koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan, perhubungan, pertanian, peternakan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, pangan dan lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Bagian Administrasi Pembangunan Daerah

Bagian Administrasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, perumusan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi urusan perencanaan,

penelitian dan pengembangan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan pengelolaan administrasi pembangunan daerah, pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pembinaan umum, pelayanan administrasi, pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi urusan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, sosial, kesehatan, penanggulangan bencana, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kinerja perangkat daerah dan aparatur daerah, pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, hubungan masyarakat, pelayanan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu daerah, keuangan, persandian, statistik, pengelolaan barang milik daerah, tata usaha pimpinan daerah, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Administrasi Umum dibantu 3 (tiga) Bagian dengan tugas sebagai berikut :

1) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kinerja perangkat daerah dan aparatur daerah, pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah,

serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, perumusan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi urusan komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, dan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, perumusan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan umum, fasilitasi, pelayanan administrasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan harmonisasi urusan keuangan, persandian dan pengelolaan barang milik daerah, keuangan dan tata usaha pimpinan daerah, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

1) Sekretaris Daerah;

2) Asisten Pemerintahan, membawahi:

a) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:

- Subbagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan;
- Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
- Subbagian Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa.

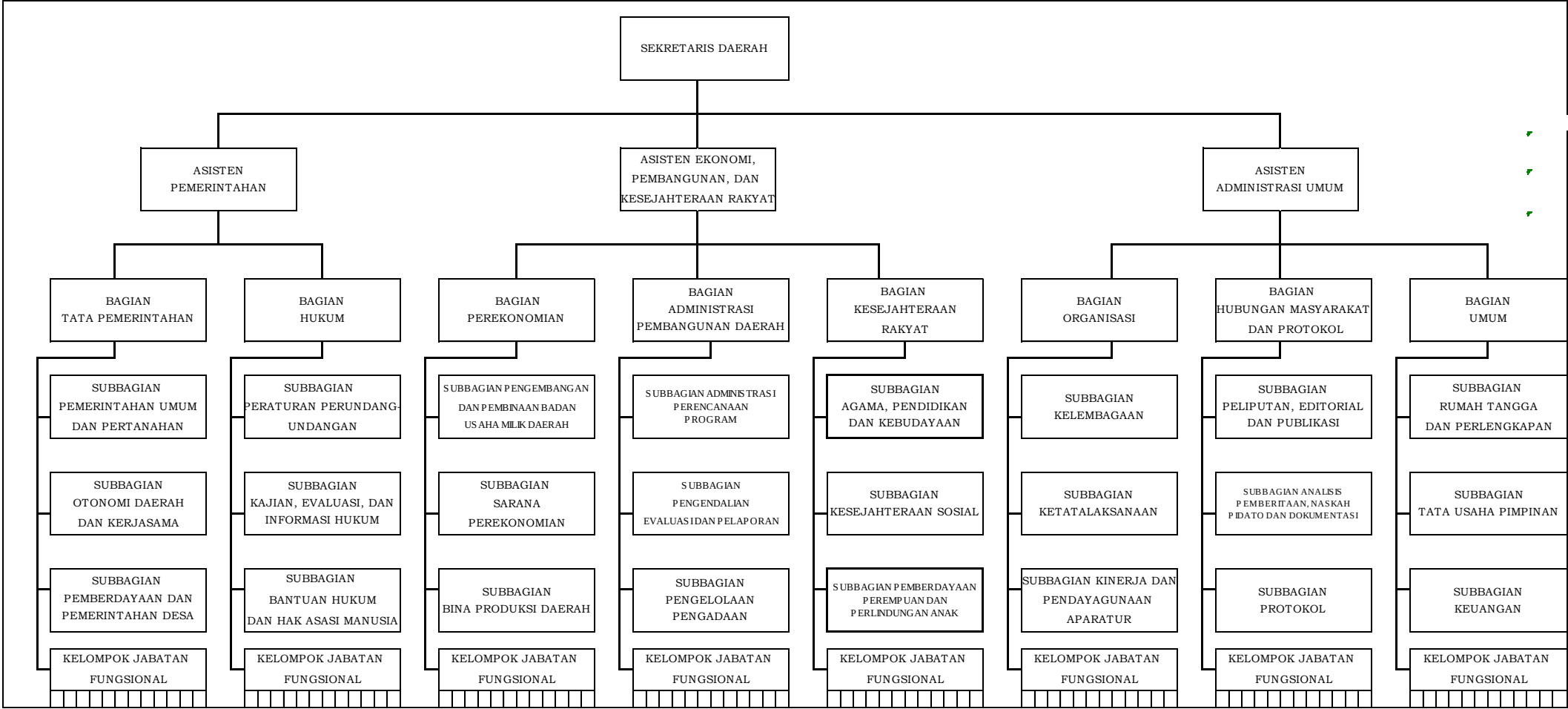
b) Bagian Hukum, membawahi:

- Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- Subbagian Kajian, Evaluasi dan Informasi Hukum; dan
- Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 3) Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Bagian Perekonomian, membawahi:
 - Subbagian Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - Subbagian Sarana Perekonomian; dan
 - Subbagian Bina Produksi Daerah.
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 - Subbagian Administrasi Perencanaan Program;
 - Subbagian Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - Subbagian Pengelolaan Pengadaan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - Subbagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan;
 - Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a) Bagian Organisasi, membawahi:
 - Subbagian Kelembagaan;
 - Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - Subbagian Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur.
 - b) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
 - Subbagian Peliputan, Editorial, dan Publikasi;
 - Subbagian Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi; dan
 - Subbagian Protokol.
 - c) Bagian Umum, membawahi:
 - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan
 - Subbagian Keuangan.

Bagan strukrur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang secara lengkap sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang



Sumber : Perda Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Sumber daya Sekretariat Daerah terdiri dari sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, adapun secara rinci sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk berjalannya suatu organisasi, karena dengan sumber daya manusia yang optimal baik secara kualitas maupun kuantitas akan mempengaruhi kinerja Organisasi.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sampai dengan awal Januari 2019 sebanyak 128 orang. Secara rinci data PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Berdasarkan Golongan dan Eselon

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Per Golongan								Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon										Jumlah PNS		
		Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV		II		III		IV		JFT		JFU		L	P	Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Asisten	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
3	Staf Ahli	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	Bagian Tata Pemerintahan	0	0	1	0	7	2	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	5	2	9	2	11
5	Bagian Hukum	0	0	1	0	3	6	1	0	0	0	1	0	1	2	0	1	2	3	4	6	10
6	Bagian Perekonomian	0	0	1	0	6	2	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	5	2	7	3	10
7	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	2	1	8	2	2	0	0	0	1	0	2	1	3	0	6	2	12	3	15
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	0	2	0	3	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	6	1	9	2	11
9	Bagian Organisasi	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	2	5	2	7
10	Bagian Humas dan Protokol	0	0	0	4	8	4	1	0	0	0	1	0	2	1	1	1	5	6	9	8	17
11	Bagian Umum	9		13	4	3	17	0	1	0	0	0	1	0	3	1	2	24	16	25	22	47
Jumlah :		10	0	21	9	40	38	10	2	3	0	6	2	14	8	7	4	53	34	83	48	131
		10		30		78		12		3		8		22		11		87		131		
Persentase :		7,6	0,0	16,0	6,9	30,5	29,0	7,6	1,5	2,3	0,0	4,6	1,5	10,7	6,1	5,3	3,1	40,5	26,0	63,4	36,6	100,0
		7,63		22,90		59,54		9,16		2,29		6,11		16,79		8,40		66,41		100,00		

Sumber : Aplikasi Semar BKPPD Kabupaten Magelang, Januari 2019.

Berdasarkan tabel diatas jumlah PNS di Sekretariat Daerah sebanyak 128 orang dengan rasio berdasarkan jenis kelamin perbandingan laki-laki dan perempuan sebesar 1 : 0,60 orang. Jumlah PNS terbanyak berdasarkan golongan adalah golongan III yaitu 80 (62,50%) orang, sedangkan berdasarkan eselon terbanyak pada jabatan fungsional umum sebanyak 84 (65,63%) orang.
Jumlah pegawai tersebut masih belum ideal dibandingkan dengan formasi jabatan yang harus ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan pemenuhan pegawai tersebut karena adanya kebijakan pemerintah untuk tidak ada penambahan pegawai atau *zero grow*.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Sekretariat Daerah dapat dilihat berdasarkan aset yang dimiliki, baik jumlah aset maupun nilai harga dari aset yang dimiliki, secara detail kondisi aset Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

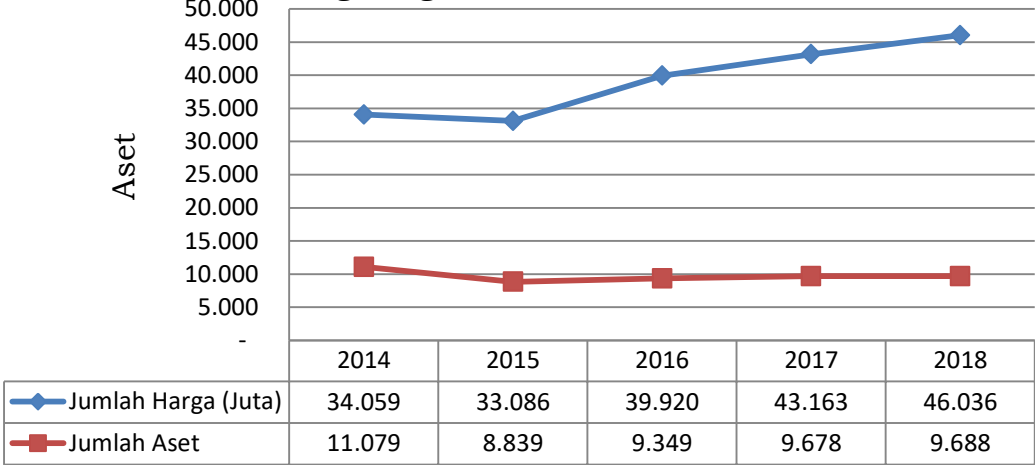
Kode Golongan	Kode Bidang barang	Nama Bidang Barang	2014		2015		2016		2017		2018	
			Jumlah	Jumlah Harga	Jumlah	Jumlah Harga	Jumlah	Jumlah Harga	Jumlah	Jumlah Harga	Jumlah	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01		TANAH	10	10.241.000.000	10	10.441.100.000	10	10.441.100.000	10	10.441.100.000	10	10.915.800.000
	01.01	Tanah	10	10.241.000.000	10	10.441.100.000	10	10.441.100.000	10	10.441.100.000	10	10.915.800.000
02		PERALATAN DAN MESIN	9.691	17.142.866.189	7.390	16.695.925.629	7.866	18.080.232.463	8.169	21.055.362.370	8.179	22.570.526.142
	02.02	Alat-Alat Besar	2	264.550.000	2	264.550.000	2	264.550.000	4	683.589.200	4	683.589.200
	02.03	Alat-Alat Angkut	86	9.108.718.106	94	9.121.499.106	94	9.121.499.106	95	10.349.111.016	95	11.581.513.586
	02.04	Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	93	59.415.825	94	68.215.825	96	82.185.825	96	82.185.825	96	63.275.325
	02.05	Alat-Alat Pertanian	143	17.635.000	52	7.170.000	52	7.170.000	52	7.170.000	52	13.970.000
	02.06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.857	6.531.037.544	6.752	6.154.773.084	7.220	7.418.592.418	7.513	8.684.947.215	7.523	8.924.390.917
	02.07	Alat Studio dan Komunikasi	510	1.101.509.714	396	1.079.717.614	402	1.186.235.114	409	1.248.359.114	409	1.303.787.114
	02.08	Alat Kedokteran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.09	Alat Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.10	Alat Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03		GEDUNG DAN BANGUNAN	86	6.576.747.600	80	5.838.493.800	96	11.281.245.643	96	11.539.960.880	96	12.191.976.078
	03.11	Bangunan Gedung	86	6.576.747.600	80	5.838.493.800	96	11.281.245.643	96	11.539.960.880	96	12.191.976.078
	03.12	Bangunan Monumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04		JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI	0	0	0	0	5	1.511.971.007	6	1.633.327.207	6	2.020.351.389
	04.13	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	1	1.265.854.815	1	1.265.854.815	1	1.265.854.815
	04.14	Bangunan Air Irigasi	0	0	0	0	4	246.116.192	4	358.072.392	4	593.425.724
	04.15	Instalasi	0	0	0	0	0	0	1	9.400.000	1	161.070.850
	04.16	Jaringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		LAINNYA	1.292	98.581.800	1.359	110.606.800	1.377	117.106.800	1.403	126.558.800	1.403	137.522.500
	05.17	Buku Dan Perpustakaan	1.291	93.411.800	1.343	99.911.800	1.361	106.411.800	1.387	115.863.800	1.387	126.827.500
	05.18	Barang Bercorak Kebudayaan	1	5.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.19	Hewan Ternak Serta Tanaman	0	0	16	10.695.000	16	10.695.000	16	10.695.000	16	10.695.000
06		KONTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.11	Bangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.12	Bangunan Monumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.13	Gedung Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.14	Jalan dan Jembatan Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH :			11.079	34.059.195.589	8.839	33.086.126.229	9.354	41.431.655.913	9.684	44.796.309.257	9.694	47.836.176.109

Sumber : Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang, data diolah 2019.

Jumlah aset Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebanyak 11.079, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 9.688 atau menurun sebanyak 12,5%, penurunan jumlah aset tersebut karena adanya pendataan ulang terhadap jumlah aset yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah. Jumlah harga/nilai aset pada tahun 2014 sebanyak Rp. 34.059.195.589,- pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 47.836.176.109 atau meningkat sebesar 40,45%, harga/nilai aset tersebut meningkat sejalan dengan penambahan jumlah aset selama tahun berjalan.

Perkembangan kondisi aset Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.1. Kondisi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018



Sumber : Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang, data diolah 2019.

Berdasarkan grafik diatas kondisi aset Sekretariat Daerah selama tahun 2014-2018 memiliki kecenderungan bertambah pada tiap tahunnya baik secara jumlah harga maupun jumlah aset yang dimiliki, kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan baik pada jumlah harga maupun pada jumlah aset. Penurunan jumlah aset tersebut dikarenakan penataan aset dan penghapusan beberapa aset yang sudah rusak atau hilang.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Tingkat capaian kinerja sasaran pada Sekretariat Daerah menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2014-2019. Secara umum indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dengan kriteria SMARTT : *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Attainable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), *Timely* (berjangka waktu tertentu) dan *Tracable* (dapat dipantau dan dikumpulkan), selain itu penempatan indikator kinerja tidak sesuai dengan level/tingkatannya dan terdapat beberapa indikator yang bukan menjadi kewenangan dari Sekretariat Daerah. Dengan tidak memenuhi kriteria SMART maka peta *cascading* dari indikator kinerja tidak bisa dipetakan dan tidak bisa dilihat pola kontribusi dari masing-masing indikator dalam mendukung ketercapaian indikator yang ada diatasnya.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah selama periode 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Magelang 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Indikator Sasaran Renstra 2014-2019)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase luas lahan bersertipikat		33,83		Persen	33,65	33,69	33,73	33,76	33,8	51,4	51,8	10,60	39,4	39,4	1,53	1,54	0,31	1,17	1,16
2	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Cakupan pelayanan kedinasan				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Aplikasi PATEN				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah				Kerjasama	25	25	25	25	25	25	25	25	38	38	1,00	1,00	1,00	1,52	1,52
7	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi anatar pemerintah daerah				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Nilai AKIP Kabupaten		B		Kategori	CC	CC	CC	B	B	CC	CC	CC	CC	CC	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
12	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional				Persen	100	100	100	100	100	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Indikator Sasaran Renstra 2014-2019)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun.				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	Persentase penyelesaian permasalahan hukum				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	Website milik Pemda				Website	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	Persentase desa tertib administrasi pelaksana raskin				Persen	11	19,80	39,80	59,00	79,60	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	3,62	2,01	1,00	0,67	0,50
21	Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa				Persen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,50	0,50	0,50	0,33	0,33	1,00	1,00	1,00	0,66	0,66
22	Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum				LKM	0	73	109	182	218	0	50	109	182	182	0,00	0,68	1,00	1,00	0,83
23	Persentase Peningkatan PAD		12,02		Persen	12,02	12,02	12,02	12,02	12	NA	7,89	8,23	7,42	7,42	0,00	0,66	0,68	0,62	0,62
24	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Indikator Sasaran Renstra 2014-2019)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
28	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30	Cakupan pelayanan kedinasan				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
31	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi				Jam/Hari	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
32	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan				Peserta	200	50	100	155	100	155	155	155	76	76	0,78	3,10	1,55	0,49	0,76
33	Cakupan kerjasama dengan media massa				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
34	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
35	Cakupan pengadaan pakaian dinas aparatur				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
36	Opini BPK "WTP"		WTP		Kategori	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
37	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rata-rata Rasio :																1,00	1,05	0,99	0,96	0,96

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 2019

Berdasarkan tabel diatas rata-rata rasio capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah sudah diatas target capaian yang ditetapkan pada tiap tahunnya, namun ada kecenderungan penurunan rata-rata rasio capaian pada setiap tahunnya, tetapi masih diatas target yang ditetapkan dengan rasio capaian diatas 1(satu), namun perlu nilai rata-rata capaian diatas 2 (dua) perlu dilakukan kajian secara menyeluruh, apakah capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pelayanan pada Sekretariat Daerah atau terlalu rendah dalam penetapan target kinerja, rata-rata rasio capaian diatas 2 (dua) menunjukkan tingkat keberhasilan capaian rata-rata diatas 200%. Kelemahan pada capaian kinerja pada Renstra Setda tahun 2014-2019 adalah penentuan indikator pada sasaran tidak sesuai dengan kaidah indikator yang seharusnya ditempatkan pada indikator sasaran yaitu berupa dampak (*inpac*), sedangkan indikator yang diukur masih terdapatnya indikator pada level program berupa *outcome* dan indikator kegiatan berupa *output*. Selain kesalahan penentuan level indikator terdapat beberapa indikator yang diukur bukan menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah seperti pada indikator kinerja WTP, sehingga keberhasilan/kegagalan dari capaian indikator tersebut bukan mencerminkan kinerja Sekretariat Daerah.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang belum tercapai adalah Nilai AKIP Kabupaten dengan target kinerja “B” sedangkan capaian kinerja “CC” dengan presentase capaian 50%. Penyebab ketidak berhasilan capaian tersebut diantaranya adalah : 1. Komitmen pimpinan yang masih lemah dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Masih lemahnya penyusunan dokumen AKIP baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, 3. Komitmen SKPD dalam pelaksanaan AKIP masih lemah, dimana masih terdapat pemikiran pelaksanaan AKIP menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah saja. Penentuan indikator yang tidak sesuai dengan kaidah penentuan indikator menjadi lemah untuk menggali permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya, indikator tersebut sebagai dasar penyusunan Renstra berikutnya.

Selain capaian keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan dari sisi pencapaian indikator kinerja sasaran, perlu diukur pula keberhasilan kinerja dari sisi keuangan, pengukuran kinerja keuangan berdasarkan kelompok belanja dan berdasarkan dan berdasarkan anggaran program yang menjadi urusan Sekretariat Daerah, secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini :

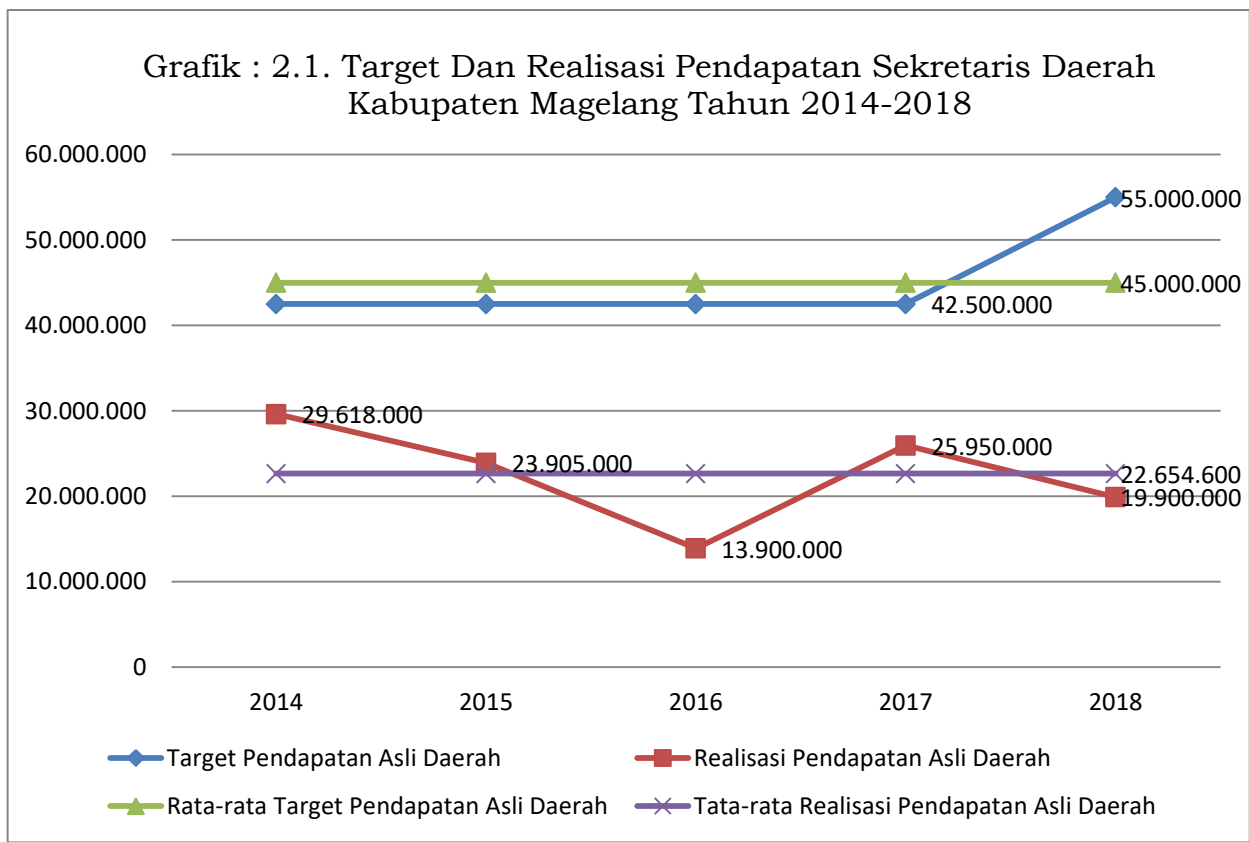
Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Jenis Pendapatan dan jenis Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	55.000.000	29.618.000	23.905.000	13.900.000	25.950.000	19.900.000	0,70	0,56	0,33	0,61	0,36	-0,04	0,01
Pendapatan Asli Daerah	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	55.000.000	29.618.000	23.905.000	13.900.000	25.950.000	19.900.000	0,70	0,56	0,33	0,61	0,36	-0,04	0,01
Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	55.000.000	29.618.000	23.905.000	13.900.000	25.950.000	19.900.000	0,70	0,56	0,33	0,61	0,36	-0,46	0,01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	39.615.968.532	39.757.806.120	41.784.967.425	49.604.077.800	41.460.265.715	31.951.927.527	36.083.792.090	38.171.259.068	23.435.736.986	37.138.759.531	0,81	0,91	0,91	0,47	0,90	0,02	0,10
Belanja Tidak Langsung	22.216.530.932	21.386.824.000	22.316.436.000	26.142.888.000	21.390.717.000	17.000.212.425	19.358.168.097	20.438.214.538	1.876.825.336	18.230.068.136	0,77	0,91	0,92	0,07	0,85	0,00	2,00
Belanja pegawai	22.216.530.932	21.386.824.000	22.316.436.000	26.142.888.000	21.390.717.000	17.000.212.425	19.358.168.097	20.438.214.538	1.876.825.336	18.230.068.136	0,77	0,91	0,92	0,07	0,85	0,00	2,00
Belanja Langsung	17.399.437.600	18.370.982.120	19.468.531.425	23.461.189.800	20.069.548.715	14.951.715.102	16.725.623.993	17.733.044.530	21.558.911.650	18.908.691.395	0,86	0,91	0,91	0,92	0,94	0,04	0,07
Belanja pegawai	3.221.446.000	4.125.782.500	199.108.000	180.703.000	153.927.500	2.869.545.000	3.945.281.700	160.486.500	174.616.000	146.876.000	0,89	0,96	0,81	0,97	0,95	-0,23	-0,16
Belanja barang dan jasa	12.075.765.100	13.164.767.120	17.740.551.425	20.916.477.800	18.262.095.615	9.992.650.477	11.765.487.424	16.095.818.916	19.096.280.353	17.173.829.197	0,83	0,89	0,91	0,91	0,94	0,12	0,16
Belanja modal	2.102.226.500	1.080.432.500	1.528.872.000	2.364.009.000	1.653.525.600	2.089.519.625	1.014.854.869	1.476.739.114	2.288.015.297	1.587.986.198	0,99	0,94	0,97	0,97	0,96	0,04	0,05

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah, 2019.

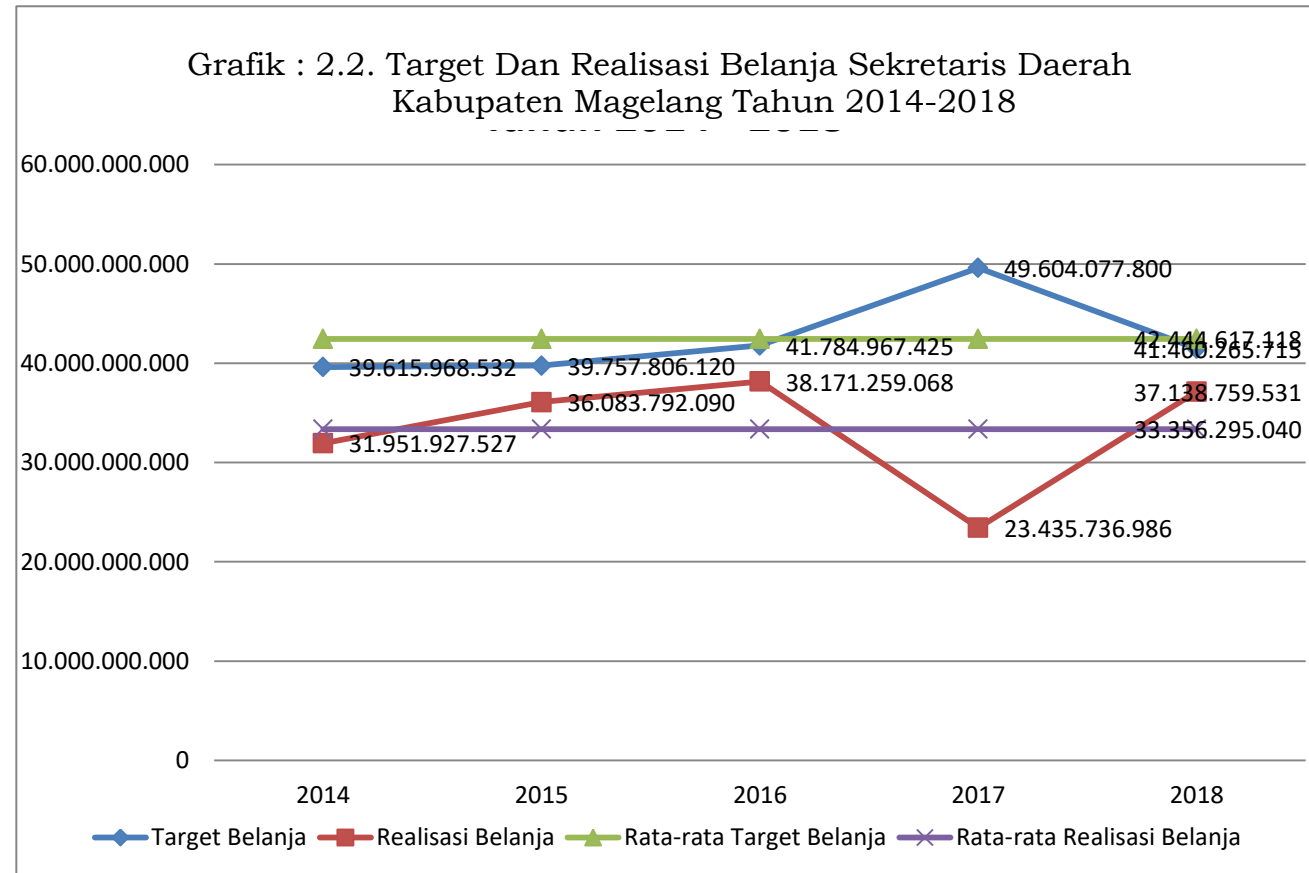
Berdasarkan tabel 2.4 rata-rata pertumbuhan realisasi pendaptan tergapad target pendapatan tahun 2014 s/d 2018 mengalami penurunan dengan rasio pertumbuhan – 0,04 (minus nol koma nol empat), pada realisasi pendapatan mengalami fluktuasi pada

setiap tahunnya dan ralisasi pendapatan pada tiap tahunnya tidak mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan mengalami penurunan yang sangat drastic pada tahun 2016 karena Pusdiklat Tegalrejo sebagai sumber pendapatan sedang dilakukan rehabilitasi, sehingga target pendapatan menurun, tingkat pertumbuhan target dan realisasi pendapatan dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:



Pada tabel 2.4 dan grafik 2.3 pertumbuhan rata-rata rasio anggaran belanja pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan sebesar 0,02 (nol koma nol dua). Pertumbuhan anggaran pada tahun 2014 s/d 2017 memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, demikian pula pada realisasi anggaran, pada tahun 2016 dan 2017 sudah diatas rata-rata pertumbuhan belanja dan realisasi anggaran sedangkan pada tahun 2018 terdapat penurunan yang sangat signifikan pada jumlah belanja sampai dibawah rata-rata pertumbuhan selama peridoe Renstra, penurunan jumlah anggarng tersebut disebabkan terbatasnya ketersediaan anggaran pada Pemerintah Daerah dan prioritas penganggaran pada pengembangan saran dan prasaran sehingga berdampak pada alokasi anggaran di Sekretariat Daerah.

Untuk mengetahui kontribusi pelaksanaan urusan pada Sekretariat Daerah maka perlu dilakukan analisa terhadap penganggaran dan realisasi anggaran pada setiap tahunnya, termasuk didalamnya analisa rasio realisasi dibandingkan anggaran serta analisa terhadap rasio pertubuhan anggaran maupun realisasi. Secara detail anggaran dan realisasi berdasarkan urusan dan program pendanaan pelayanan perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 sebagai berikut :



Tabel : 2.5. Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Urusan dan Program Pendanaan Perangkat Daerah
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	55.000.000	29.618.000	23.905.000	13.900.000	25.950.000	19.900.000	0,70	0,56	0,33	0,61	0,36	-0,04	0,01
Pendapatan Asli Daerah	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	55.000.000	29.618.000	23.905.000	13.900.000	25.950.000	19.900.000	0,70	0,56	0,33	0,61	0,36	-0,04	0,01
Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	55.000.000	29.618.000	23.905.000	13.900.000	25.950.000	19.900.000	0,70	0,56	0,33	0,61	0,36	-0,46	0,01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URUSAN	16.212.539.614	18.370.984.135	18.703.006.941	22.938.037.217	20.069.550.733	13.873.005.416	16.725.626.008	17.041.965.448	21.059.811.252	18.908.693.413	0,86	0,91	0,91	0,92	0,90	0,06	0,09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.289.989.000	4.615.470.500	5.181.852.470	6.639.258.000	6.223.201.000,00	4.044.735.286	4.338.680.282	4.749.390.969	6.245.289.311	5.797.402.081	0,94	0,94	0,92	0,94	0,93	0,10	0,10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.275.766.300	4.536.969.000	3.835.139.000	4.173.713.000	4.281.526.600,00	4.610.484.161	3.999.772.731	3.315.641.614	3.958.865.766	4.155.943.846	0,87	0,88	0,86	0,95	0,97	-0,05	-0,01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	67.000.000	92.000.000	95.450.000	86.850.000	90.850.000,00	58.041.180	88.202.600	89.773.800	84.418.900	90.603.100	0,87	0,96	0,94	0,97	1,00	0,09	0,14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	40.000.000	10.000.000	7.500.000	257.916.000,00	0	0	0	0	182.298.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	8,51	0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	243.700.000	495.771.000	489.063.000	626.146.600	280.538.300,00	232.134.800	432.185.544	455.777.970	585.029.111	273.211.565	0,95	0,87	0,93	0,93	0,97	0,19	0,17
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	20.250.000	20.250.000	20.250.000	21.000.000	0	19.849.900	19.638.725	18.449.850	20.948.855	0	0,98	0,97	0,91	1,00	0,00	-0,24	-0,23
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	35.000.000	190.000.000	165.397.000	165.000.000	165.000.000,00	34.684.100	183.029.995	154.087.190	164.674.160	164.957.650	0,99	0,96	0,93	1,00	1,00	1,07	1,05
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	0	0	8.000.000	0	9.579.800	0	0	4.277.750	0	0,96	0,00	0,00	0,53	0,00	-0,50	-0,50
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	120.000.000	0	0	0	0	111.520.000	0	0	0	0	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	20.000.000	20.000.000	35.000.000	30.000.000	42.496.000,00	19.129.000	19.508.500	34.487.675	25.132.300	40.164.460	0,96	0,98	0,99	0,84	0,95	0,26	0,28
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	24.000.000	20.000.000	20.000.000	21.000.000	0	23.999.950	19.874.665	19.783.920	20.999.850	0	1,00	0,99	0,99	1,00	0,00	-0,28	-0,28
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	30.000.000	24.000.000	22.500.000	23.000.000	0	29.204.850	22.949.640	19.999.915	22.999.825	0	0,97	0,96	0,89	1,00	0,00	-0,31	-0,30
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	31.500.000	24.000.000	23.000.000	24.000.000	0	31.498.700	23.933.945	22.143.390	23.999.700	0	1,00	1,00	0,96	1,00	0,00	-0,31	-0,31
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	30.000.000	24.000.000	23.000.000	24.000.000	0	28.919.950	21.196.750	22.549.465	23.997.475	0	0,96	0,88	0,98	1,00	0,00	-0,30	-0,28

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realiasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	40.000.000	38.850.000	31.927.500	38.065.000		39.704.500	32.128.645	30.124.538	32.802.690	0	0,99	0,83	0,94	0,86	0,00	-0,25	-0,29
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	907.465.000	857.520.000	320.266.000	1.411.445.000	1.707.515.600,00	842.535.050	841.999.830	303.911.400	1.375.860.618	1.609.826.368	0,93	0,98	0,95	0,97	0,94	0,73	0,76
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	343.130.000	2.012.141.000	0	0	370.446.315,00	313.133.100	1.795.427.960		0	350.621.125	0,91	0,89	0,00	0,00	0,95	0,97	0,93
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	160.000.000	476.800.000	353.000.000	0		154.916.350	424.304.825	293.873.530	0	0	0,97	0,89	0,83	0,00	0,00	0,18	0,11
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1.179.333.000	683.149.000	568.790.000	780.000.000	320.450.000,00	737.608.500	631.896.050	494.295.400	682.719.640	313.594.625	0,63	0,92	0,87	0,88	0,98	-0,20	-0,13
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000	79.790.000	81.312.000,00	26.272.200	23.098.780	26.989.265	67.978.759	72.561.035	0,88	0,77	0,90	0,85	0,89	0,42	0,41
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	727.463.000	877.965.720	1.112.850.925	1.569.969.000	976.808.000,00	599.866.875	726.992.591	984.165.095	1.353.486.588	857.016.151	0,82	0,83	0,88	0,86	0,88	0,13	0,14
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	10.000.000	15.000.000	10.000.000	22.422.000	39.861.000,00	7.504.900	9.726.515	8.100.059	14.471.446,00	1.832.948	0,75	0,65	0,81	0,65	0,05	0,55	0,01
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	144.800.000	141.885.000	146.770.000	7.500.000		117.867.800	131.739.375	138.426.830	0	0	0,81	0,93	0,94	0,00	0,00	-0,48	-0,21
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	35.000.000	24.675.000	25.000.000	148.653.000		34.551.800	24.660.750	23.716.100	96.873.175	0	0,99	1,00	0,95	0,65	0,00	0,92	0,44
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	174.000.000	170.147.000	212.620.000	137.907.000	206.126.900,00	167.614.600	161.408.160	190.303.778	131.918.075	194.366.296	0,96	0,95	0,90	0,96	0,94	0,09	0,08
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	375.870.000	177.453.000	769.800.000	0		323.501.100	152.631.475	663.697.055	0	0	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,45	0,46
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	1.028.625.800	192.475.000	59.000.000	669.756.000	130.729.000,00	420.744.900	184.522.450	54.129.500	239.755.575	128.005.875	0,41	0,96	0,92	0,36	0,98	2,01	0,42
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	321.845.500	371.000.000	64.988.000	302.498.000	79.915.000,00	320.867.950	360.758.900	62.850.000	300.800.585	79.349.950	1,00	0,97	0,97	0,99	0,99	0,56	0,59
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	395.300.000	466.201.000	755.832.000	984.854.000	1.056.854.000,00	393.766.500	460.487.975	744.418.500	907.246.950	992.138.025	1,00	0,99	0,98	0,92	0,94	0,29	0,27
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	92.500.000	130.770.000	151.270.330	185.964.000	140.326.000,00	84.989.000	111.791.970	120.308.677	169.895.719	137.427.543	0,92	0,85	0,80	0,91	0,98	0,14	0,15
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	35.000.000	35.060.000	0	0	0	33.776.600	34.129.400	0	0	0	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	0	82.017.000	195.000.000	0	0	0	76.015.200	188.786.095	0	0	0,00	0,93	0,97	0,00	0,00	0,09	0,12
Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	0	1.283.049.900	2.175.718.500	2.812.510.000	1.698.106.500,00	0	1.179.579.165	2.104.328.875	2.702.871.980	1.683.515.070	0,00	0,92	0,97	0,96	0,99	0,15	0,17
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	0	202.363.000	1.756.616.000	1.782.015.500	1.759.268.500,00	0	193.350.600	1.666.863.262	1.666.597.136	1.629.779.738	0,00	0,96	0,95	0,94	0,93	1,92	1,90
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	0	0	42.904.200	120.219.100	106.802.000,00	0	0	40.589.715	101.897.921	101.776.425	0,00	0,00	0,95	0,85	0,95	0,42	0,38
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	0	0	0	35.000.000	53.500.000,00	0	0	0	33.999.375	52.299.400	0,00	0,00	0,00	0,97	0,98	0,13	0,13
Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2019-2024																	

Kontribusi anggaran dalam pelaksanaan program menggambarkan besaran anggaran dalam mendukung pelaksanaan program tersebut pada setiap tahunnya, pada tahun 2018 terdapat 15 (42%) program tidak mendapatkan alokasi dari 36 Program yang ada dalam Renstra, hal ini karena keterbatasan anggaran APBD dan prioritas pembangunan pada pengembangan infrastruktur daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya diantaranya:

Tantangan:

a. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005 senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam, sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*). Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang tepat atau “*right sizing*” dan optimal untuk melaksanakan fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di Kabupaten Magelang baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik

lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

c. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

d. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

e. Kebijakan Pemerintah pusat yang dinamis dan adanya ketidak harmonisan anatar kebijakan Pemerintah pusat berpengaruh pada optimalisasi kinerja Sekretariat Daerah, untuk itu perlu dilakukan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat di daerah serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah.

f. Terdapat peraturan perundang-undangan daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak selaras dengan perkembangan kebutuhan di daerah, sehingga perlu melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah.

g. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang profesional dan handal; Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

h. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (*public fund*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

i. Pengadaan Barang dan Jasa

Dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang, selain kompleksitas aturan dalam proses pengadaan barang dan jasa jumlah barang yang perlu diproses pengadaannya juga semakin meningkat, sehingga perlu adanya lembaga dan sumberdaya yang cukup dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

j. Pengembangan Humas dan Keprotokolan

Keterbukaan publik dan pelayanan terhadap keprotokolan menjadi tuntutan dalam pelayanan kedinasan, sehingga informasi pelaksanaan kedinasan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

k. Pengembangan perekonomian

Pengembangan perekonomian yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan perlu terus dikembangkan dan difasilitasi, baik pada pengembangan kelembagaan, permodalan maupun pengembangan sumber daya manusianya agar dapat bersaing dalam perekonomian global era 4.0.

l. Pengembangan BUMD

Pengembangan BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah perlu terus dikembangkan agar dapat bersaing dalam era persaingan global dan terus berkembang dalam pengelolaan kekayaan daerah.

- m. Pengendalian pembangunan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan, untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.
- n. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penyusunan kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat perlu ditindaklanjuti dalam bentuk aturan yang terkoordinasi oleh bagian kesra.

Peluang:

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah adalah :

- a. Adanya dukungan positif dari Kepala Daerah dan seluruh OPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi;
- b. Adanya landasan hukum yang kuat sebagai dasar perumusan kebijakan daerah;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat dihimpun sebagai bahan perumus kebijakan;
- d. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi;
- e. Adanya bantuan arahan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten;
- i. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi;
- j. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan memungkinkan dukungan positif bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
- k. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
- l. Pengadaan Barang dan Jasa
Tingginya kebutuhan jumlah pengadaan barang/jasa dan adanya system yang terbangun menjadi peluang dalam memperoleh barang/jasa yang berkualitas.
- m. Pengembangan Humas dan Keprotokolan
Keterbukaan informasi memberikan peluang memberikan informasi hasil pembangunan kepada masyarakat.
- n. Pengembangan perekonomian
Era persaingan global 4.0 menjadi peluang dalam pengembangan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan
- o. Pengembangan BUMD
Potensi dan letak geografis Kabupaten Magelang menjadi peluang dalam pengembangan BUMD, dengan mengembangkan unit usaha yang bernilai ekonomi tinggi.

p. Pengendalian pembangunan

Pengendalian pembangunan secara berkala dapat mencegah timbulnya potensi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

q. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Kekayaan budaya dan keanekaragaman masyarakat perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan agar dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.

Untuk memenuhi harapan diatas, maka akan dioptimalkan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Magelang sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Identifikasi permasalahan melalui analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam Rencana Strategis, yang menjadikan dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2019-2024.

Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah adalah :

- 1) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
- 2) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 4) Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah;
- 5) Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
- 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 7) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaran pemerintah daerah	Belum optimalnya Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	Belum optimalnya Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum
			Belum optimalnya Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Belum optimalnya Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
			Belum optimalnya Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah
			Belum optimalnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			Belum optimalnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa
		Belum optimalnya Penataan Peraturan Perundang - undangan dan Bantuan Hukum	Belum optimalnya fungsi Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
			Belum optimalnya fungsi Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
			Belum optimalnya fungsi Kajian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
			Belum optimalnya Pengelolaan JDIH
			Belum optimalnya penanganan permasalahan hukum dan harmonisasi konsep kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama
			Belum optimalnya penyuluh hukum dan HAM
		Belum optimalnya Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Belum optimalnya pembinaan BUMD
			Belum optimalnya Penyusunan Kajian Pengembangan BUMD
			Belum optimalnya pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
			Belum optimalnya pelaksanaan Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi Masyarakat
			Belum optimalnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCHT
			Belum optimalnya Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan Peredaran Pupuk dan LPG Bersubsidi
		Belum optimalnya Pengembangan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan	Belum optimalnya Pengembangan Administrasi Perencanaan Pembangunan
			Belum optimalnya Penyusunan LKPJ

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Pembangunan	Belum optimalnya Pengendalian, evaluasi dan pelaporan administrasi pembangunan
			Belum optimalnya Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa
		Belum optimalnya Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Belum optimalnya Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
			Belum optimalnya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
			Belum optimalnya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Belum optimalnya fungsi Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Belum optimalnya perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial
			Belum optimalnya perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak
			Belum optimalnya fungsi perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial Agama, Pendidikan dan Budaya
			Belum optimalnya Pengembangan dan pengelolaan Islamic Center di Kabupaten Magelang
		Belum optimalnya Pengembangan Kelembagaan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	Belum optimalnya kesesuaian kelembagaan OPD terhadap peraturan perundangan
			Belum optimalnya Penyusunan evaluasi jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah
			Belum optimalnya pengembangan ketatalaksanaan perangkat daerah
			Belum optimalnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah
			Belum optimalnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
			Belum optimalnya Pengembangan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi
2.	Belum optimalnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolonan	Belum optimalnya layanan Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi
			Belum optimalnya layanan Peliputan, Editorial, dan Publikasi
			Belum optimalnya Layanan Keprotokolonan
		Belum optimalnya Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	Belum optimalnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Belum optimalnya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Belum optimalnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan
			Belum optimalnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan
			Belum optimalnya Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Belum optimalnya Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu

Terdapat 2 (dua) masalah pokok yang dihadapi Sekretariat Daerah, yaitu: 1. Belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaran pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan, dalam menjalankan fungsi tersebut dijalankan oleh 6 (enam) bagian, yaitu : Bagian Tata Pemerintahan, Organisasi, Hukum, Administrasi Pembangunan Daerah, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. 2. Belum optimalnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah, permasalahan tersebut sesuai dengan fungsi Bagian Umum dan Humas dan Protokol dalam meberikan pelayanan kepada Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta fungsi pelayanan public pada Sekretariat Daerah.

Untuk mengetahui adanya permasalahan terkait tugas dan fungsi maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Magelang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standart yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar dari Kewenangan Perangkat Daerah)	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Perangkat Daerah					
Menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah	Belum optimal	Peraturan Perundang-undangan	- Mengkordinasikan perumusan kebijakan dengan pihak terkait	- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang dinamis	- Perubahan peraturan perundangan oleh pemerintah pusat terlalu cepat dan sering
				- Benturan peraturan dan kepentingan antar Kementerian/Lembaga	- Banyaknya aturan Pusat yang tidak sinkron
			- Kurangnya SDM	- Pembatasan pengangkatan ASN	- Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
Pelayanan administrasi, data dan informasi	Belum optimal	Peraturan Perundang-undangan, SOP	- SOP belum lengkap	- Tuntutan perbaikan pelayanan	- SOP tidak dijalankan dengan baik
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	Belum optimal	Peraturan Perundang-undangan	- Fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan Perangkat Daerah terkait	- Kebijakan dari pemerintah pusat/provinsi dan Legeslatif	- Pelaksanaan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi yang belum optimal
				- Adanya respon positif/negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dari masyarakat.	- Hasil monitoring dan evaluasi tidak segera ditindaklanjuti
			- Kurangnya SDM	- Pembatasan pengangkatan ASN	- Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standart yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar dari Kewenangan Perangkat Daerah)	
1	2	3	4	5	6
Perumusan produk hukum daerah	Belum optimal	Peraturan Perundang-undangan	- Koordinasi perumusan produk hukum dengan Perangkat Daerah terkait	- Kibijakan pemerintah pusat dan provinsi yang dinamis	- Masih terdapat Perangkat Daerah terkait kurang responsif dan kurang memahami dalam penyusunan produk hukum
				- Penyusunan Perda harus melalui mekanisme fasilitasi, evaluasi dan registrasi pemeririntah Provinsi	- Alur penyusunan produk hukum yang sangat panjang
Layanan Pengadaan barang dan Jasa	Belum optimal	Peraturan Perundang-undangan	- Belum terbentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa setingkat eselon III	- Evaluasi kelembagaan telah mendukung terbentuknya Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa Setingkat Eselon III	- Proses Pengadaan barang dan jasa terhambat

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati dan Wakil Bupati Magelang

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG
YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH”
(SEDAYA AMANAH)**

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu “Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah”. Adapun makna yang terkandung adalah:

“Sejahtera”, terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata, dalam terminologi jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir-batin, jasmani-rohani, dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

“Berdaya saing”, terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Berdaya Saing, yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan ditengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

“Amanah”, terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Amanah, yang dimaksud adalah keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, serta komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka dijabarkan misi pembangunan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar, mencakup pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Komponen pendidikan dalam mewujudkan peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, komponen kesehatan dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan kesehatan, sedangkan komponen daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan ketahanan pangan daerah dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana public, terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat, baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat.

- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi diantaranya adalah dengan meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi antara lain pengembangan pertanian pariwisata dan UKM, pengembangan sarana dan prasarana publik, serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik, dan pelestarian lingkungan hidup.

- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Pada periode yang lalu, tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.

Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan *smart regency* dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media. Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan 3 (tiga) misi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan misi ke 3 (tiga) kepala daerah yaitu : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah”, dengan titik berat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang amanah melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Upaya mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 di jabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran daerah. Tujuan untuk pencapaian misi tersebut terdiri dari :

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya paritas daya beli masyarakat, dan meningkatnya pembangunan berbasis gender;
- 2) Meningkatnya daya saing daerah; dan
- 3) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan *akuntable*.

Pada tujuan ke 3 terdapat 5 sasaran strategis yang terdiri dari :

- a. meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan indikator sasaran nilai AKIP;
- b. meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator sasaran indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- c. meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan indikator sasaran opini BPK;
- d. meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- e. meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian dengan indikator sasaran indeks *merit system*.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut Sekretariat Daerah melaksanakan tujuan ke 3 (tiga) “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan *akuntable*”, dengan sasaran strategis pertama “meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan indikator sasaran nilai AKIP”. Sasaran strategis RPJMD tersebut selanjutnya menjadi Tujuan yang akan dicapai pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, dirumuskan melalui 10 (sepuluh) prioritas pembangunan dan program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa Dasa Cita Kabupaten Magelang yang merupakan janji politik yang akan diwujudkan dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia, melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan akhlak mulia.
- 2) Pendidikan, melalui peningkatan pemerataan pendidikan yang seluas-luasnya dan peningkatan mutu pendidikan.
- 3) Kesehatan, melalui peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan terjangkau.
- 4) Penanggulangan Kemiskinan, melalui penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi.
- 5) Pengembangan Pertanian Pariwisata dan UKM, melalui pemanfaatan sektor unggulan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
- 6) Sarana dan Prasarana Publik, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana public.
- 7) Lingkungan Hidup, melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat.
- 8) Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.
- 9) Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana, melalui peningkatan ketenteraman, ketertiban dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- 10) Kepemudaan dan Olahraga, melalui peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berprestasi.

Sekretariat Daerah mendapatkan tugas untuk mewujudkan program prioritas ke 8, yaitu : “Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel” dengan fokus pelaksanaan program “melanjutkan reformasi birokrasi”.

Dalam pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Daerah. Pendorong merupakan kondisi yang dapat mendorong , menumbuhkan dan memengaruhi sesuatu organisasi menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya, sedangkan faktor Penghambat merupakan hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu Organisasi menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing Dan Amanah” (Sedaya Amanah)					
No	Misi dan Program KDH/Wakil KDH	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.	Tugas :			
		Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.	Belum optimalnya pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative	- Kebijakan dari kementerian/lembaga sering tumpang tindih dan belum adanya aturan operasional dari kebijakan yang dikeluarkan	Adanya regulasi dalam pelaksanaan fungsi koordinasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang.
	Program :	Fungsi :			
	8 Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, melalui peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.	1 Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;	- Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran belum konsisten	- Dokumen perencanaan lima tahunan tidak sepenuhnya dijadikan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan	- Adanya dokumen perencanaan dan proses perencanaan pada setiap tahunnya
		2 Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;	- Kebijakan/regulasi dari kementerian teknis belum bisa ditindaklanjuti secara maksimal	- Kebijakan/Regulasi belum ditindaklanjuti dalam bentuk aturan pelaksanaan/ belum dilaksanakan sosialisasi	- Adanya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan

No	Misi dan Program KDH/Wakil KDH	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
		3 Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;	- Pelaksanaan fungsi koordinasi belum optimal	- Perangkat Daerah dalam pelaksanaan fungsi koordinasi kurang mempedomani peraturan Bupati tentang fungsi koordinasi	- Adanya Peraturan Bupati tentang pelaksanaan fungsi koordinasi
		4 Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah;	- Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi masih lemah	- Data dan informasi kurang didokumentasikan dengan baik	- Adanya pengelolaan dan pemanfaatan data secara elektronik
		5 Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;	- Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah belum berjalan dengan optimal	- Banyaknya pejabat merangkap sebagai pelaksana tugas	- Komitmen aparatur dalam penyelesaian pekerjaannya
		6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;	- Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah belum optimal	- Masih adanya bagian yang belum paham tugas Sekretariat Daerah sebagai fungsi koordinasi dan fasilitasi kebijakan	- Adanya regulasi dari instansi vertikal
		7 Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;	- Pengelolaan kepegawaian belum optimal	- Pengelolaan kepegawaian dirangkap pada Bagian Organisasi	- Komitmen untuk penyelesaian pengelolaan kepegawaian
		8 Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan	- Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas belum optimal.	- Rapat koordinasi dan evaluasi tidak dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.	- Adanya regulasi pelaksanaan pemantau, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Telaah Renstra Kementerian yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). Sedangkan telaah terhadap Renstra Provinsi dilakukan terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.3.1. Telaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

a. Telaah Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Strategis pada Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 yang terkait dengan Renstra Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- 1). Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
- 2). Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- 3). Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- 4). Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- 5). Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- 6). Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

b. Telaah Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)

Target capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang yang terkait dengan Renstra Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Sekretaris Negara adalah :

- 1) Program Reformasi Birokrasi, program ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Sasaran Strategisnya diarahkan untuk :
 - a) Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Ketatalaksanaan
 - b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aparatur
 - c) Meningkatnya Akuntabilitas
 - d) Perbaikan bidang pengawasan
 - e) Meningkatnya budaya kerja/etika birokrasi
- 2) Sasaran Strategis Kementerian Sekretaris Negara dalam Rencana Strategis Kementerian Sekretaris Negara 2015-2019 adalah :
 - a) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada presiden

- dan wakil presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada presiden dan wakil presiden
- c) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam melaksanakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara.

Menelaah Rencana Strategis Kementrian Sekretaris Negara, Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang juga mempunyai peran membantu bupati dalam hal :

- 1) Menyusun dan menyelenggarakan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;
- 2) Menyenggarakan kegiatan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan layanan pengadaan; dan
- 3) Menyenggarakan kegiatan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

3.3.2. Telaah Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengan Tahun 2018 - 2023, sebagai berikut:

- 1). Peningkatan Sinergitas Kebijakan Daerah,
- 2). Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
- 3). Peningkatan Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan telaah diatas maka Renstra Kementerian yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Terkait Dengan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah.

No	Kemendagri	Kemenpan RB	Setda Prov. Jateng
1	2	3	4
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;	Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada presiden dan wakil presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;	Peningkatan Sinergitas Kebijakan Daerah,

No	Kemendagri	Kemenpan RB	Setda Prov. Jateng
1	2	3	4
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.	Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada presiden dan wakil presiden	Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;	Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam melaksanakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;		
4	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.		
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.		

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Posisi Komplek Sekretariat Daerah merupakan kawasan kawasan perkotaan, dimana wilayah kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi. Kota Mungkid sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Magelang dan

merupakan pusat perkantoran Sekretariat Daerah sebagai kawasan perkotaan Mungkid, sebagaimana diatur dalam pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten Magelang disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang secara materiil dan moril.

Rencana Struktur Ruang Sekretariat Daerah berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Komplek Sekretariat Daerah merupakan kawasan Pengembangan PPL sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) huruf a
2. Pendukung pusat pertumbuhan Komplek Sekretariat Daerah dengan prioritas sebagai pusat kawasan perkantoran yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Magelang,
3. Pengembangan Kelurahan Sawitan dimana Komplek Sekretariat Daerah berada sebagai kawasan perkantoran. Serta Rencana Pola Ruang Komplek Sekretariat Daerah pada wilayah Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid meliputi:

Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan sebagai mana diatur dalam pasal 47 ayat (1) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a, salah satunya adalah a. Kawasan Perkotaan Mungkid. Dalam penjelasan peraturan Bupati Kota Mungkid sebagai pusat administrasi pemerintahan Kabupaten, pendidikan, kebudayaan dan perekonomian. Dalam pasal 47 ayat (4) Pusat pertumbuhan Kota Mungkid, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan, Salaman dan Tempuran.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan pada KLHS mengacu pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan dalam SDG's. Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan ke 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh, dengan isu strategi target pembangunan berkelanjutan yang belum tercapai adalah : Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), Penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan dan Indeks reformasi birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik.

Pada pilar hukum dan tata kelola ini tidak memiliki atau tidak terkait langsung dengan isu strategis yang dihasilkan dari kondisi

lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar hukum dan tata kelola di Kabupaten Magelang, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum
dan Tata Kelola Kelembagaan

TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi Lingkungan Hidup
Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Isu Strategis : a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) b. Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan. c. Indeks reformasi birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik.	Tidak ada, karena tidak terkait langsung dengan isu strategis yang dihasilkan dari kondisi lingkungan hidup

Berdasarkan uraian diatas Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD Kabupaten magelang 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD terkait Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019 - 2024

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
I	RTRW				
A	Pola Ruang Struktur RTRW				
	Berdasarkan matrik indikasi program utama RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 pada lampiran VI Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 tidak terdapat program indikatif yang terkaid dengan Sekretariat Daerah	Tugas Sekretariat Daerah : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Fungsi Sekretariat Daerah : 1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah; 2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah; 4. Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah; 5. Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 7. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah; 8. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.	1. Belum optimalnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Belum optimalnya kualitas pelayanan public	1. Adanya kebijakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. 2. Perbaikan kulaitas pelayanan publik	1. Komitmen dan dukungan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan akuntabilitas. Masih kurang. 2. Budaya Kerja yang masih rendah
B	Struktur Ruang RTRW 1. Sebagai kawasan		1. Keterbatasan Perkantoran Sekretariat Daerah.	Adanya masterplant penataan perkantoran di Kota Mungkid	Terbatasnya ketersediaan lahan

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
	Pengembangan PPL sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) huruf a 2. Pendukung pusat pertumbuhan Komplek Sekretariat Daerah dengan prioritas sebagai pusat kawasan perkantoran yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Magelang, 3. Pengembangan kawasan perkantoran.				
II	KLHS				
A	Permasalahan dan isu strategis Pilar 16 SDG's : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan		a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) b. Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan. c. Indeks reformasi birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik.	d. Terbangunnya system akuntabilitas yang terintegrasi e. Telah terbentuknya UKPBJ. f. Adanya komitmen dan team reformasi birokrasi	a. Rendahnya komitmen dan pemahaman perangkat daerah.tentang akuntabilitas b. SDM pengelola UKPBJ belum devinitif. c. Pemahaman

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
	yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan				reformasi birokrasi yang masih kurang
B	Skenario dan Rekomendasi	Tidak ada, karena tidak terkait langsung dengan isu strategis yang dihasilkan dari kondisi lingkungan hidup	Tidak ada, karena tidak terkait langsung dengan isu strategis yang dihasilkan dari kondisi lingkungan hidup	-	-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah terdapat beberapa Isu strategis terkait dengan isu strategis pembangunan global, nasional dan daerah, meliputi isu-isu :

1. Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis terdiri dari isu strategis pada tatanan global, nasional maupun daerah yang terdiri dari :

a. SDG's (*Sustainable Development Goals*)

Dengan berakhirnya MDG's (*Milenium Development Goals*) pada tahun 2015 maka ditetapkan SDG's (*Sustainable Development Goals*) sebagai pengembangan dan tindak lanjut pelaksanaan MDG's yang membahas isu-isu pembangunan internasional. Terkait permasalahan pembangunan daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, terdapat 1 (satu) isu pembangunan yaitu “mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan”.

b. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi saat ini sudah menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan dan pelayanan sistem pemerintahan untuk mengimbangi tuntutan pelayanan terhadap masyarakat dari semua lini kehidupan termasuk perkembangan teknologi dan informasi serta industri dan perekonomian yang melaju pesat. Era industri 4.0 harus disambut dengan penataan fungsi kebijakan dan pelayanan dari lembaga pemerintahan sampai ke tingkat daerah, sehingga tidak tertinggal terhadap pesatnya perkembangan teknologi.

2. Lingkungan Nasional

Agenda Reformasi Birokrasi Tahap II tahun 2015-2019 mengamatkan pelaksanaan : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas, hal ini menuntut pelaksanaan dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di tiap daerah untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi tersebut.

Pelaksanaan reformasi birokrasi juga sejalan dengan pelaksanaan Nawa Cita ke 2 (dua) Presiden Republik Indonesia 2014-2019, yaitu “membuat pemerintah tidak absen dengan

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”.

3. Lingkungan Provinsi

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Sampai dengan tahun 2018, nilai AKIP Kabupaten Magelang adalah CC (59,05), hal ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga kedepan perlu dipacu dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten sejajar Provinsi Jawa Tengah dan bahkan melampaui Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota.

4. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Magelang dirumuskan berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah masa yang lalu, khususnya terkait dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Permasalahan pembangunan juga diidentifikasi dari seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta yang ingin dicapai di masa datang yang didasarkan pada kondisi riil saat ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik berprinsip pada: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, dan responsif. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Tata kelola pemerintahan yang baik berprinsip pada: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, dan responsif. Regulasi yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia diatur di dalam UU Pelayanan Publik, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Etika Penyelenggara Negara. Berdasarkan sejarahnya, *good governance* diterapkan sejak dimulainya era reformasi yang dimana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam sistem pemerintahan, termasuk di Kabupaten Magelang.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Magelang. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu arah kebijakan RPJP Kabupaten Magelang yaitu terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Dalam mencapai arah kebijakan itu, maka diperlukan: 1) Meningkatnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didukung oleh aparatur daerah yang profesional, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 2) Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, ditunjang dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat dan meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; 3). Berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat yang mandiri,

menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat berbagai kendala yang perlu untuk dihadapi dan diselesaikan. Kendala yang pertama adalah membenahi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum optimal. Akuntabilitas kinerja menunjukkan seberapa kinerja pemerintah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Magelang menjadi persoalan tersendiri, mengingat terdapat beberapa hal yang masih belum mencapai standar atau target yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang belum berjalan dengan optimal. Sistem tersebut dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu aspek perencanaan, pelaporan implementasi, dan monitoring dan evaluasi (monev). Kendala utama yang dihadapi dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas kinerja yang optimal terletak pada indikator-indikator perencanaan yang belum sinkron dan terukur. Indikator yang sinkron dan terukur menjadi penting dalam tahapan-tahapan sistem pemerintahan karena indikator tersebut menunjukkan keterkaitan antar tahapan dan keterukuran proses perencanaan hingga pengawasan program atau kegiatan. Apabila indikator suatu program dapat tersinkronisasi dan terukur, maka dapat tercipta pelayanan publik yang baik karena tujuan dari program tersebut menjadi lebih jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya indikator yang baik, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Magelang akan menjadi belum optimal yang dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Magelang.

Sistem manajemen pemerintahan merupakan suatu bentuk inovasi birokrasi yaitu dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengorganisasikan SDM. Dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut, maka proses pengelolaan SDM akan menjadi lebih mudah. Pengelolaan SDM dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai dalam rangka pelayanan publik. Saat ini pengembangan sistem manajemen kepegawaian Kabupaten Magelang masih belum optimal.

Lemahnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah (perda) di Kabupaten Magelang juga mengindikasikan belum optimalnya pelayanan publik sebagai bentuk supremasi hukum. Suatu perda disusun sebagai sebuah regulasi yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban

umum di suatu wilayah. Penegakan perda harus didukung oleh komitmen pemerintah daerah yang kuat dan kerjasama lintas sektoral. Komitmen pemerintah daerah dapat diwujudkan dengan terus memfasilitasi pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugas penegakan perda. Sedangkan kerjasama lintas sektoral dan stakeholder bertujuan untuk terbentuknya kesepakatan terkait peraturan-peraturan yang sudah disepakati sehingga pelanggaran perda dapat diminimalisasi. Saat ini, komitmen pemerintah Kabupaten Magelang dalam penegakan perda masih belum optimal, mengingat masih adanya otoritas penegak perda yang belum difasilitasi dengan baik dan komunikasi pihak-pihak terkait penegakan perda masih belum optimal. Apabila penegakan perda dapat berjalan dengan baik, maka pelayanan publik di Kabupaten Magelang menjadi lebih optimal karena ketenteraman dan ketertiban umum menjadi lebih kondusif.

Smart City di era 4.0 sudah merupakan tuntutan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan publik, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat, solusi bagi permasalahan masyarakat, publikasi potensi daerah, dan percepatan pembangunan.

Isu-isu Strategis Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Pemetaan Isu-isu Strategis Pembangunan Global,
Nasional dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN 2014- 2019)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018- 2023	Isu Strategis KLHS RPJMD Kab. Magelang 2019-2024	Isu Strategis RPJMD Kab. Magelang 2019-2024
1	2	3	4	5
Isu ke 16 Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Isu ke 2 Tata kelola birokrasi efektif dan efisien	Isu ke 7 Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Isu ke 16 Tata kelola pemerintahan	Isu ke 3 Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap visi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dalam waktu satu sampai lima tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dalam rangka mencapai memecahkan permasalahan serta menangani Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Tujuan

- Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- Indikator tujuan : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), indikator tujuan mengadopsi indikator Sasaran RPJMD.
- Alasan pemilihan indikator tujuan adalah : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah Sistem AKIP merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang meliputi : perencanaan kinerja, perencanaan program/kegiatan, penyusunan anggaran, pelaksanaan Program/kegiatan, pengukuran dan pelaporan keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, dan pelaksanaan evaluasi internal.
- Formulasi penghitungan indikator tujuan : Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi mengacu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Permenpan 12/2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Satuan : Angka (1-100) dan Huruf

2. Sasaran :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaran pemerintah daerah.
 - Indikator sasaran : Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaran pemerintah daerah.
 - Alasan pemilihan indikator sasaran adalah : Kualitas kebijakan penyelenggaran pemerintah daerah merupakan

ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

- Formulasi penghitungan indikator sasaran :
$$\frac{(((\text{Jumlah kebijakan yang tidak bermasalah/jumlah kebijakan yang ada (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Peraturan Bersama)) + ((\text{Jumlah kebijakan yang ada/jumlah kebijakan yang seharusnya ada}) \times 100\%)))}{2}$$
 - Satuan : Persen
- b. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kesekretariatan Daerah.
- Indikator sasaran : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Alasan pemilihan indikator sasaran adalah : Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
 - Formulasi penghitungan indikator sasaran : Hasil Survei Kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan RB nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik . Rumus :
$$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang})$$
 - Satuan : Angka (1-100)

Secara terperinci tujuan, sasaran, indikator serta dan kinerja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
 Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran						Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	58,82 (CC)	59,05 (CC)	61,04 (B)	63,03 (B)	65,02 (B)	67,01 (B)	69,00 (B)	71,00 (BB)	71,00 (BB)
		Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaran pemerintah daerah	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaran pemerintah daerah.	NA	NA	NA	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	80,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	77,10	83,25	83,50	83,75	84,00	84,25	84,50	85,00	85,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Dalam menjalankan tujuan dan sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah diperlukan strategi dan arah kebijakan yang perlu diambil, sehingga target capaian kinerja yang ditetapkan lebih terarah, dapat dicapai dan terukur.

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta diturunkan dalam kebijakan dan program kegiatan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang
Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaran pemerintah daerah	1.1. Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	1.1.1. Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum
			1.1.2. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			1.1.3. Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
			1.1.4. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah
			1.1.5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			1.1.6. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa
		1.2 Peningkatan Penataan Peraturan Perundang - undangan dan Bantuan Hukum	1.2.1. Meningkatkan fungsi Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
			1.2.2. Meningkatkan fungsi Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
			1.2.3. Peningkatan fungsi Kajian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
			1.2.4. Peningkatan Pengelolaan JDIH
			1.2.5. Optimalisasi Penanganan Permasalahan Hukum dan Harmonisasi Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama
			1.2.6. Optimalisasi Penyuluh Hukum dan HAM
		1.3. Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	1.3.1. Peningkatan pembinaan BUMD
			1.3.2. Penyusunan Kajian Pengembangan BUMD
			1.3.3. Opatimalisasi pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
			1.3.4. Optimalisasi pelaksanaan Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			1.3.5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCHT
			1.3.6. Optimalisasi Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan Peredaran Pupuk dan LPG Bersubsidi
		1.4. Pengembangan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	1.4.1. Pengembangan Administrasi Perencanaan Pembangunan
			1.4.2. Penyusunan LKPJ
			1.4.3. Optimalisasi Pengendalian, evaluasi dan pelaporan administrasi pembangunan
			1.4.4. Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa
		1.5. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	1.5.1. Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
			1.5.2. Optimalisasi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
			1.5.3. Peningkatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		1.6. Mengoptimalkan fungsi Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	1.6.1. Optimalisasi perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial
			1.6.2. Optimalisasi perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak
			1.6.3. Optimalisasi fungsi perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial Agama, Pendidikan dan Budaya
			1.6.4. Pengembangan dan pengelolaan Islamic Center di Kabupaten Magelang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		1.7. Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	1.7.1. Meningkatkan kesesuaian kelembagaan OPD terhadap peraturan perundangan
			1.7.2. Penyusunan evaluasi jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan SKPD
			1.7.3. Mengembangkan ketatalaksanaan perangkat daerah
			1.7.4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah
			1.7.5. Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
			1.7.6. Pengembangan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	2.1. Peningkatan kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan	2.1.1. Peningkatan layanan Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi
			2.1.2. Peningkatan layanan Peliputan, Editorial, dan Publikasi
			2.1.3. Peningkatan Layanan Keprotokolan
		2.2. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	2.2.1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			2.2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan
			2.2.3. Peningkatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan
			2.2.4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan
			2.2.5. Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			2.2.6. Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu

Berdasarkan tabel diatas dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Sekretariat Daerah melaksanakan 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) sasaran strategis. Strategi yang diambil dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut sebanyak 9 (sembilan) strategi ditunjang dengan 44 (empat puluh empat) arah kebijakan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka diperlukan rencana program, kegiatan dan indikatif pendanaan serta indikator dan target kinerja yang akan dicapai. Rencana program, kegiatan dan indikatif pendanaan serta indikator dan target kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Program pembangunan Daerah. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pendanaan indikatif merukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan program untuk mencapai target keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditentukan.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

Nama kegiatan, program dan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 terdiri dari :

Tabel 6.1
Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019-2024.

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3
1	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3
1.1	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum	1. Jumlah kecamatan yang melaksanakan paten 2. jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
1.2	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya
1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1. Jumlah Dokumen LPPD 2. Jumlah Dokumen Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah 3. Jumlah Dokumen Unsur Rupabumi yang Nama-namanya Telah Dibakukan 4. Jumlah Desk Pilkada 5. Jumlah Pelantikan KDH/ WKDH 6. Jumlah Desk Pemilu 7. Jumlah Laporan SPM 8. Jumlah koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
1.4	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah	1. Jumlah dokumen Kerjasama Antar Daerah 2. Jumlah dokumen Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 3. Jumlah Kontribusi/ Iuran APKASI 4. Jumlah Kontribusi/ Iuran FORSESDASI
1.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Jumlah rumusan konsep kewenangan desa 2. Jumlah Produk Hukum Daerah tentang Desa 3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi desa
1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa	1. Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi pencairan Bantuan Keuangan Khusus 2. Jumlah Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pemerintahan desa
2	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	1. Persentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti 2. Persentase dokumen ketatalaksanaan yang diterapkan 3. Persentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik 4. Persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3
2.1	Peningkatan Kesesuaian Kelembagaan OPD terhadap Peraturan Perundangan	Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun
2.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan SKPD	1. Jumlah dokumen evaluasi jabatan 2. Jumlah kamus standart kompetensi jabatan yang disusun
2.3	Pengembangan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen ketatalaksanaan perangkat daerah yang disusun 2. Jumlah dokumen Proses Bisnis perangkat daerah yang disusun
2.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan survei kepuasan masyarakat 2. Jumlah inovasi Pelayanan publik yang diikutsertakan dalam lomba
2.5	Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen penetapan perjanjian kinerja yang disusun 2. Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun
2.6	Pengembangan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi	1. Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi 2. Jumlah SKPD yang menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 3. Jumlah SKPD yang mengembangkan Zona Integritas 4. Jumlah SKPD yang mengembangkan Budaya Kerja
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	1. Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas 2. Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas 3. Persentase permasalahan hukum yang didampingi
3.1	Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi serta Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1. Jumlah Dokumen Propemperda 2. Jumlah dokumen Raperda 3. Jumlah Raperda yang dibahas di tingkat DPRD
3.2	Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1. Jumlah Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah yang disusun 2. Jumlah Keputusan Bupati/Keputusan Kepala SKPD yang disusun

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3
3.3	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian dan evaluasi Peraturan perundang-undangan yang disusun
3.4	Pengelolaan JDIH	Jumlah Dokumen Hukum yang dikelola
3.5	Penanganan Permasalahan Hukum dan Harmonisasi Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	1. Jumlah Permasalahan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang ditangani
		2. Jumlah Konsep Kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerjasama yang diharmonisasi
3.6	Penyuluhan Hukum dan HAM	1. Jumlah Penyuluhan Hukum
		2. Jumlah Laporan Capaian Aksi HAM dan Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM yang disusun
4	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	1. Persentase Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan
		2. Persentase BUMD yang Berkinerja Baik
		3. Persentase Peningkatan Sumbangan BUMD pada PAD
4.1	Pembinaan BUMD	1. Jumlah BUMD yang Dibina
		2. Jumlah Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD yang Diseleksi
4.2	Penyusunan Kajian Pengembangan BUMD	1. Jumlah Dokumen Peraturan yang Disusun
		2. Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan BUMD
4.3	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TPAKD
		2. Jumlah Dokumen Rekapitulasi Program Kegiatan Prioritas yang Difasilitasi Melalui Program TJSL dan PKBL
		3. Jumlah LKM yang Dipersiapkan Untuk Berbadan Hukum dan Berijin
		4. Jumlah Database SIKP
4.4	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
		2. Jumlah Forum Penyelenggaraan Posko Terpadu
4.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCHT	Jumlah SKPD Pelaksana Pengguna DBHCHT
4.6	Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan Peredaran Pupuk dan LPG Bersubsidi	1. Jumlah Kios Pupuk Lengkap yang Dimonitoring
		2. Jumlah Pangkalan yang Dimonitoring

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3
5	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
5.1	Administrasi Perencanaan Pembangunan	1. Jumlah pedoman perencanaan pembangunan yang disusun 2. Jumlah daftar calon penerima hibah bansos
5.2	Penyusunan LKPJ	1. Dokumen LKPJ yang disusun 2. Jumlah dokumen LAMJ yang tersusun
5.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan	Pelaporan administrasi pembangunan yang tersusun : laporan perkembangan kegiatan APBD, Bankeu dan DAK
6	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Kematangan UKPBJ
6.1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pengadaan barang/jasa yang dilayani
6.2	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	1. Jumlah lembaga pengadaan barang/jasa yang terbina / teradvokasi 2. Jumlah pelaku pengadaan barang/jasa yang terbina / teradvokasi
6.3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah layanan pengadaan secara elektronik yang dikelola
7	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
7.1	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang kesejahteraan sosial
7.2	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah pelaksanaan kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang perlindungan perempuan dan anak
7.3	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya	1. Jumlah kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang agama, pendidikan dan budaya 2. Jumlah Bulan Pengelolaan Islamic Center
8	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	Cakupan Kinerja Kehumasan dan Layanan Keprotokolan
8.1	Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi	1. Jumlah dokumen analisis pemberitaan, naskah pidato, dan dokumentasi yang disusun 2. Sistem Aplikasi Analisis Pemberitaan

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3
8.2	Peliputan, Editorial, dan Publikasi	Jumlah dokumen peliputan, editorial, dan publikasi yang disusun
8.3	Layanan Keprotokolan	Jumlah Layanan Keprotokolan
9	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
9.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan - kegiatan pemerintah daerah
9.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan	1. Jumlah/ macam pengadaan peralatan rumah jabatan
		2. Jumlah/ macam pengadaan perlengkapan rumah jabatan
9.3	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan	1. Jumlah rumah jabatan yang dipelihara
		2. Jumlah/ macam rehabilitasi rumah jabatan
9.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
9.5	Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Jumlah personil yang disediakan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH
		2. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/ WKDH
		3. Jumlah koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan KDH/ WKDH.
		4. Jumlah cinderamata dan karangan bunga yang tersedia selama satu tahun
		5. Jumlah/ macam pengadaan pakaian dinas KDH/ WKDH
		6. Jumlah kursus/ diklat yang diikuti KDH/ WKDH
9.6	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu pemerintah daerah

Sumber : Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah

Berdasarkan tabel diatas untuk pencapaian tujuan dan sasaran didukung sebanyak 9 (sembilan) program dengan 16 (enam belas) indikator kinerja hasil/*outcome*, dan dijabarkan dalam 50 (lima puluh) kegiatan dengan 87 (delapan puluh tujuh) indikator keluaran/*ouput*.

Total anggaran sampai dengan akhir periode Renstra sebesar Rp. 117.682.165.000 (seratus tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), secara detail rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir pada lampiran 1 tabel 6.2.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja Sekretariat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, indikator sasaran pada RPJMD diadopsi menjadi tujuan pada Renstra, demikian juga pada penentuan target pada indikator tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Indikator tujuan pada renstra merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang mengacu pada indikator sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah bidang urusan mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019-2024, secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan									
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	58,82 (CC)	59,05 (CC)	61,04 (B)	63,03 (B)	65,02 (B)	67,01 (B)	69,00 (B)	71,00 (BB)	71,00 (BB)
1.1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah									
	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.	NA	NA	NA	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	80,00
1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Kesekretariatan Daerah									
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	77,10	83,25	83,50	83,75	84,00	84,25	84,50	85,00	85,00

Sumber : Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah

Untuk mencapai Tujuan Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dijabarkan dalam 5 (lima) tahun capaian. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan indikator kinerja tujuan Sekretariat Daerah dengan target akhir periode

Renstra dengan nilai 71,00 dengan katagori BB, pada target periode Renstra tahun 2014-2019 telah ditargetkan katagori B tetapi belum tercapai. Indikator sasaran terdiri dari capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target akhir Renstra 80% dan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai target akhir Renstra 85.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran terhadap program yang diusulkan dapat dilihat pada program dan indikator program yang mendukung ketercapaian sasaran dan tujuan pada RPJMD.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019-2024, secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan										
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka 1-100	58,82 (CC)	59,05 (CC)	61,04 (B)	63,03 (B)	65,02 (B)	67,01 (B)	69,00 (B)	71,00 (BB)	71,00 (BB)
1.1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah										
	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.	Persen	NA	NA	NA	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	80,00
1.1.1	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan										
	persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan	Persen	na	na	90	90	90	95	95	95	95
1.1.2	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi										
	Prosentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentase dokumen ketatalsanaan yang diterapkan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentase dokumen evaluasi kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	Persen	90	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum										

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase permasalahan hukum yang didampingi	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	100
1.1.4	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian										
	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase BUMD yang Berkinerja Baik	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Sumbangan BUMD pada PAD	Persen	0	0	12	12	12	12	12	12	12
1.1.5	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan										
	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	100
1.1.6	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/ Jasa										
	Indeks Kematangan UKPBJ	Level	0	3	3	4	4	5	5	5	5
1.1.7	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan										
	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persen	NA	100	0	0	0	0	0	100	100
1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Kesekretariatan Daerah										
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka 1-100	77,10	83,25	83,50	83,75	84,00	84,25	84,50	85,00	85,00
1.2.1	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan										
	Cakupan Kinerja Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	Persen	0	0	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah										
	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah

Berdasarkan tabel tersebut indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD didukung dengan 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 9 (sembilan) program beserta indikator kinerja yang diukur pada setiap tahunnya.

Untuk mengetahui keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator didalamnya dalam bentuk turunan yang saling terkait dan menunjang, maka digambarkan dalam bentuk *cascading* indikator sebagaimana pada tabel 7.3 lampiran 2

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang akan berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magelang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Untuk mengukur keberhasilan dilakukan proses penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan terhadap target kinerja yang telah tertuang dalam dokumen Renstra.

Sekretariat Daerah secara periodik mengantisipasi perkembangan di masa mendatang dengan berorientasi pada hasil yang dicapai dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul selama periode Renstra termasuk kemungkinan keterbatasan anggaran. Anggaran yang direncanakan bersifat indikatif, dimana jumlah anggaran yang dialokasikan dalam penganggaran tahun berjalan sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 diharapkan mengakomodir kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi salah satu pedoman serta acuan sehingga dapat memfasilitasi dalam implementasi berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah dan Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199203 1 007

Lampiran 1 : Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Magelang 2019-2024

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Magelang 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024					
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Nilai AKIP	59,05 (CC) angka (0-100) (huruf)	61,04 (B) angka (0-100) (huruf)	63,03 (B) angka (0-100) (huruf)	2.122.140.000	65,02 (B) angka (0-100) (huruf)	2.122.140.000	67,01 (B) angka (0-100) (huruf)	2.122.140.000	69 (B) angka (0-100) (huruf)	2.122.140.000	71 (BB) angka (0-100) (huruf)	2.122.140.000	71 (BB) angka (0-100) (huruf)	10.610.700.000		
				Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	- Persen	- Persen	70,00 Persen	2.122.140.000	72,5 Persen	2.122.140.000	75 Persen	2.122.140.000	77,5 Persen	2.122.140.000	80,00 Persen	2.122.140.000	80,00 Persen	10.610.700.000		
	4.1.4.1.3.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na persen	na persen	100 persen	192.140.000	100 persen	192.140.000	100 persen	192.140.000	100 persen	192.140.000	100 persen	192.140.000	100 persen	960.700.000			
	4.1.4.1.3.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah surat yang dikelola	na surat	800 surat	800 surat	10.000.000	750 surat	10.000.000	750 surat	10.000.000	800 surat	10.000.000	850 surat	10.000.000	850 surat	50.000.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem	
			2. Jumlah arsip yang di kelola	na dokumen	400 dokumen	400 dokumen		450 dokumen		500 dokumen		600 dokumen		600 dokumen		600 dokumen				
	4.1.4.1.3.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	na rapat	80 rapat	80 rapat	152.140.000	70 rapat	152.140.000	70 rapat	152.140.000	90 rapat	152.140.000	90 rapat	152.140.000	90 rapat	760.700.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem	
			2. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	na perjalanan dinas	80 perjalanan dinas	80 perjalanan dinas		90 perjalanan dinas		90 perjalanan dinas		80 perjalanan dinas		80 perjalanan dinas		80 perjalanan dinas				
			3. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	na perjalanan dinas	200 perjalanan dinas	200 perjalanan dinas		250 perjalanan dinas		250 perjalanan dinas		200 perjalanan dinas		200 perjalanan dinas		200 perjalanan dinas				
	4.1.4.1.3.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	na paket	na paket	2 paket	20.000.000	3 paket	20.000.000	3 paket	20.000.000	3 paket	20.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	100.000.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem	
			2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	na paket	4 paket	5 paket		4 paket		5 paket		4 paket		4 paket		4 paket				
			3. Jumlah aset yang di kelola	na buah	50 buah	50 buah		60 buah		60 buah		70 buah		70 buah		70 buah				
	4.1.4.1.3.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah peralatan yang dipelihara	na buah	70 buah	70 buah	10.000.000	60 buah	10.000.000	60 buah	10.000.000	80 buah	10.000.000	80 buah	10.000.000	80 buah	50.000.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem	
			2. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	na buah	80 buah	80 buah		90 buah		90 buah		100 buah		100 buah		100 buah				
3. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit					
4. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			4 unit	4 unit	4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit					
4.1.4.1.3.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na persen	na persen	100 persen	40.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	200.000.000				
4.1.4.1.3.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Jumlah kegiatan yang dikelola	na kegiatan	na kegiatan	17 kegiatan	20.000.000	17 kegiatan	20.000.000	17 kegiatan	20.000.000	18 kegiatan	20.000.000	18 kegiatan	20.000.000	18 kegiatan	100.000.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem		
		2. Jumlah laporan keuangan yang tersusun	na dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen					
4.1.4.1.3.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	na dokumen	na dokumen	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	50.000.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
		4.1.4.1.3.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	na dokumen	4 dokumen	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	50.000.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem
				2. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan per-tribulanan yang tersusun	na dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
				3. Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun	na dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
		4.1.4.1.3.1.33	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan	na persen	na persen	90 persen	1.890.000.000	90 persen	1.890.000.000	90 persen	1.890.000.000	95 persen	1.890.000.000	95 persen	1.890.000.000	95 persen	9.450.000.000		
		4.1.4.1.3.1.33.1	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum	1. Jumlah kecamatan yang melaksanakan paten	21 kecamatan	21 kecamatan	21 kecamatan	450.000.000	21 kecamatan	450.000.000	21 kecamatan	450.000.000	21 kecamatan	450.000.000	21 kecamatan	450.000.000	21 kecamatan	2.250.000.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem
				2. jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	21 kecamatan	21 kecamatan	21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan			
		4.1.4.1.3.1.33.2	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya	na dokumen	3 dokumen	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	250.000.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem
		4.1.4.1.3.1.33.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1. Jumlah Dokumen LPPD	1 kali	1 kali	1 kali	1.000.000.000	1 kali	1.000.000.000	1 kali	1.000.000.000	1 kali	1.000.000.000	1 kali	1.000.000.000	1 kali	5.000.000.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem
				2. Jumlah Dokumen Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				3. Jumlah Dokumen Unsur Rupabumi yang Nama-namanya Telah Dibakukan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				4. Jumlah Desk Pilkada	1 kali	na kali	na kali		na kali		na kali		na kali		1 kali		1 kali			
				5. Jumlah Pelantikan KDH/ WKDH	na kali	1 kali	na kali		na kali		na kali		na kali		1 kali		1 kali			
				6. Jumlah Desk Pemilu	na kali	1 kali	na kali		na kali		na kali		na kali		1 kali		na kali			
				7. Jumlah Laporan SPM	na dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				8. Jumlah koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	12 kali	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			
		4.1.4.1.3.1.33.4	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah	1. Jumlah dokumen Kerjasama Antar Daerah	na dokumen	5 dokumen	10 dokumen	80.000.000	10 dokumen	80.000.000	10 dokumen	80.000.000	10 dokumen	80.000.000	15 dokumen	80.000.000	15 dokumen	400.000.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem
				2. Jumlah dokumen Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	na dokumen	25 dokumen	25 dokumen		25 dokumen		25 dokumen		25 dokumen		25 dokumen		25 dokumen			
				3. Jumlah Kontribusi/ luran APKASI	na Tahun	na Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
				4. Jumlah Kontribusi/ luran FORSESDASI	na Tahun	na Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		4.1.4.1.3.1.33.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Jumlah rumusan konsep kewenangan desa	na dokumen	0 dokumen	1 dokumen	210.000.000	0 dokumen	210.000.000	1 dokumen	210.000.000	0 dokumen	210.000.000	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	1.050.000.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem
				2. Jumlah Produk Hukum Daerah tentang Desa	na dokumen	5 dokumen	8 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
				3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi desa	na dokumen	56 dokumen	75 dokumen		73 dokumen		73 dokumen		73 dokumen		73 dokumen		73 dokumen			
		4.1.4.1.3.1.33.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa	1. Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi pencairan Bantuan Keuangan Khusus	na kali	367 kali	367 kali	100.000.000	367 kali	100.000.000	367 kali	100.000.000	367 kali	100.000.000	367 kali	100.000.000	367 kali	500.000.000	Setda - Bagian Tapem	Setda - Bagian Tapem
				2. Jumlah Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pemerintahan desa	na kali	5 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4.1.4.1.3.2.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	NA persen	NA persen	100 persen	258.320.000	100 persen	258.320.000	100 persen	258.320.000	100 persen	258.320.000	100 persen	258.320.000	100 persen	1.291.600.000		
		4.1.4.1.3.2.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah surat yang dikelola	4767 surat	4750 surat	4750 surat	8.500.000	4800 surat	8.500.000	4800 surat	8.500.000	5000 surat	8.500.000	5000 surat	8.500.000	5000 surat	42.500.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
				2. Jumlah arsip yang dikelola	NA Arsip	NA Arsip	150 Arsip		160 Arsip		170 Arsip		180 Arsip		200 Arsip		200 Arsip			
		4.1.4.1.3.2.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	30 Perjalanan	41 Perjalanan	60 Perjalanan	150.000.000	80 Perjalanan	150.000.000	90 Perjalanan	150.000.000	100 Perjalanan	150.000.000	110 Perjalanan	150.000.000	481 Perjalanan	750.000.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
				2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	25 Perjalanan	27 Perjalanan	30 Perjalanan		35 Perjalanan		40 Perjalanan		45 Perjalanan		45 Perjalanan		212 Perjalanan			
				3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	9 Rapat	15 Rapat	15 Rapat		20 Rapat		20 Rapat		25 Rapat		25 Rapat		120 Rapat			
		4.1.4.1.3.2.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	3 Paket	67.000.000	3 Paket	67.000.000	3 Paket	67.000.000	3 Paket	67.000.000	3 Paket	67.000.000	16 Paket	335.000.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
				2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		10 Paket			
		4.1.4.1.3.2.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah peralatan yang dipelihara	16 unit	16 unit	20 unit	7.820.000	20 unit	7.820.000	20 unit	7.820.000	22 unit	7.820.000	22 unit	7.820.000	22 unit	39.100.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
				2. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	16 Unit	19 Unit	19 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit			
		4.1.4.1.3.2.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	4 Kali	4 Kali	4 Kali	25.000.000	4 Kali	25.000.000	4 Kali	25.000.000	4 Kali	25.000.000	4 Kali	25.000.000	4 Kali	125.000.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
		4.1.4.1.3.2.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	NA Persen	NA Persen	100 Persen	46.500.000	100 Persen	46.500.000	100 Persen	46.500.000	100 Persen	46.500.000	100 Persen	46.500.000	100 Persen	232.500.000		
		4.1.4.1.3.2.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	11 Kegiatan	14 Kegiatan	13 Kegiatan	6.500.000	13 Kegiatan	6.500.000	13 Kegiatan	6.500.000	13 Kegiatan	6.500.000	13 Kegiatan	6.500.000	13 Kegiatan	32.500.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
		4.1.4.1.3.2.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
				2. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
		4.1.4.1.3.2.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	50.000.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
				2. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pertribulan uang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
				3. Jumlah dokumen jangka menengah yang tersusun	NA dokumen	NA dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
				4. Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen	na Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		4.1.4.1.3.2.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Norma, Standart, prosedur dan kriteria perangkat daerah yang tersusun	NA dokumen	NA dokumen	15 dokumen	20.000.000	15 dokumen	20.000.000	15 dokumen	20.000.000	15 dokumen	20.000.000	15 dokumen	20.000.000	75 dokumen	100.000.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
		4.1.4.1.3.2.37	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	1. Persentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti	0 Persen	100 Persen	100 Persen	955.000.000	100 Persen	915.000.000	100 Persen	915.000.000	100 Persen	915.000.000	100 Persen	930.000.000	100 Persen	4.630.000.000		
				2. Persentase dokumen ketatalaksanaan yang diterapkan	0 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
				3. Persentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				4. Persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	90 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
		4.1.4.1.3.2.37.1	Peningkatan Kesesuaian Kelembagaaan OPD terhadap Peraturan Perundangan	Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	500.000.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
		4.1.4.1.3.2.37.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan SKPD	1. Jumlah dokumen evaluasi jabatan 2. Jumlah kamus standart kompetensi jabatan yang disusun	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 48 Dokumen	1 Dokumen 48 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen 48 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen 48 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen 48 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen 48 Dokumen	210.000.000	6 Dokumen 48 Dokumen	1.070.000.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
		4.1.4.1.3.2.37.3	Pengembangan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen ketatalaksanaan perangkat daerah yang disusun 2. Jumlah dokumen Proses Bisnis perangkat daerah yang disusun	0 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 10 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen 24 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen 32 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen 40 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen 48 Dokumen	80.000.000	6 Dokumen 48 Dokumen	400.000.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
		4.1.4.1.3.2.37.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan survei kepuasan masyarakat 2. Jumlah inovasi Pelayanan publik yang diikutsertakan dalam lomba	150 Unit 2 Unit	150 Unit 3 Unit	150 Unit 3 Unit	175.000.000	150 Unit 3 Unit	175.000.000	150 Unit 3 Unit	175.000.000	150 Unit 3 Unit	175.000.000	150 Unit 3 Unit	175.000.000	150 Unit 18 Unit	875.000.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
		4.1.4.1.3.2.37.5	Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen penetapan perjanjian kinerja yang disusun 2. Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	4 Dokumen 2 Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen 2 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen 2 Dokumen	210.000.000	4 Dokumen 2 Dokumen	210.000.000	4 Dokumen 2 Dokumen	215.000.000	24 Dokumen 12 Dokumen	1.035.000.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
		4.1.4.1.3.2.37.6	Pengembangan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi	1. Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi 2. Jumlah SKPD yang menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 3. Jumlah SKPD yang mengembangkan Zona Integritas 4. Jumlah SKPD yang mengembangkan Budaya Kerja	0 Dokumen 0 Dokumen 0 SKPD 0 SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen 2 SKPD 2 SKPD	0 Dokumen 48 Dokumen 3 SKPD 4 SKPD	150.000.000	0 Dokumen 0 Dokumen 3 SKPD 4 SKPD	150.000.000	0 Dokumen 0 Dokumen 4 SKPD 4 SKPD	150.000.000	0 Dokumen 0 Dokumen 4 SKPD 4 SKPD	150.000.000	0 Dokumen 0 Dokumen 4 SKPD 4 SKPD	150.000.000	1 Dokumen 48 Dokumen 20 SKPD 26 SKPD	750.000.000	Setda - Bagian Organisasi	Setda - Bagian Organisasi
		4.1.4.1.3.3.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na Persen	na Persen	100 Persen	225.000.000	100 Persen	225.000.000	100 Persen	230.000.000	100 Persen	230.000.000	100 Persen	235.000.000	100 Persen	1.145.000.000		
		4.1.4.1.3.3.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	na Surat	na Surat	3000 Surat	15.000.000	3000 Surat	15.000.000	3000 Surat	20.000.000	3000 Surat	20.000.000	3000 Surat	25.000.000	3000 Surat	95.000.000	Setda - Bagian Hukum	Setda - Bagian Hukum
		4.1.4.1.3.3.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana 2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana 3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	na kali na kali na kali	na kali na kali na kali	50 kali 50 kali 15 kali	150.000.000	50 kali 50 kali 15 kali	150.000.000	50 kali 50 kali 15 kali	150.000.000	50 kali 50 kali 15 kali	150.000.000	50 kali 50 kali 15 kali	150.000.000	50 kali 50 kali 15 kali	750.000.000	Setda - Bagian Hukum	Setda - Bagian Hukum
		4.1.4.1.3.3.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	na paket na paket	na paket na paket	1 paket 1 paket	50.000.000	1 paket 0 paket	50.000.000	1 paket 1 paket	50.000.000	1 paket 1 paket	50.000.000	0 paket 1 paket	50.000.000	0 paket 1 paket	250.000.000	Setda - Bagian Hukum	Setda - Bagian Hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	4.1.4.1.3.3.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	na peralatan	na peralatan	7 peralatan	10.000.000	7 peralatan	10.000.000	7 peralatan	10.000.000	7 peralatan	10.000.000	7 peralatan	10.000.000	7 peralatan	50.000.000	Setda - Bagian Hukum	Setda - Bagian Hukum
		4.1.4.1.3.3.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	na persen	na persen	100 persen	15.000.000	100 persen	15.000.000	100 persen	15.000.000	100 persen	15.000.000	100 persen	15.000.000	100 persen	75.000.000		
		4.1.4.1.3.3.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	na kegiatan	na kegiatan	11 kegiatan	15.000.000	11 kegiatan	15.000.000	11 kegiatan	15.000.000	11 kegiatan	15.000.000	11 kegiatan	15.000.000	11 kegiatan	75.000.000	Setda - Bagian Hukum	Setda - Bagian Hukum
		4.1.4.1.3.3.32	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	1. Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas	0 Persen	0 Persen	100 Persen	837.808.000	100 Persen	837.808.000	100 Persen	845.988.000	100 Persen	845.988.000	100 Persen	855.000.000	100 Persen	4.222.592.000		
				2. Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas	0 Persen	0 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
				3. Persentase permasalahan hukum yang didampingi	0 Persen	0 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
		4.1.4.1.3.3.32.1	Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi serta Asistensi Pembahasan Rancangan	1. Jumlah Dokumen Propempera	na Dokumen	na Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	Setda - Bagian Hukum	Setda - Bagian Hukum
				2. Jumlah dokumen Raperda	na Dokumen	na Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				3. Jumlah Raperda yang dibahas di tingkat DPRD	na Dokumen	na Dokumen	9 Dokumen		9 Dokumen		9 Dokumen		9 Dokumen		9 Dokumen		9 Dokumen			
		4.1.4.1.3.3.32.2	Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1. Jumlah Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah yang disusun	na Dokumen	na Dokumen	40 Dokumen	150.000.000	40 Dokumen	150.000.000	40 Dokumen	150.000.000	40 Dokumen	150.000.000	40 Dokumen	150.000.000	40 Dokumen	750.000.000	Setda - Bagian Hukum	Setda - Bagian Hukum
				2. Jumlah Keputusan Bupati/Keputusan Kepala SKPD yang disusun	na Dokumen	na Dokumen	480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen			
		4.1.4.1.3.3.32.3	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian dan evaluasi Peraturan perundang-undangan yang disusun	na Dokumen	na Dokumen	6 Dokumen	81.808.000	6 Dokumen	81.808.000	6 Dokumen	89.988.000	6 Dokumen	89.988.000	6 Dokumen	99.000.000	6 Dokumen	442.592.000	Setda - Bagian Hukum	Setda - Bagian Hukum
		4.1.4.1.3.3.32.4	Pengelolaan JDIH	Jumlah Dokumen Hukum yang dikelola	na Dokumen	na Dokumen	60 Dokumen	100.000.000	60 Dokumen	100.000.000	60 Dokumen	100.000.000	60 Dokumen	100.000.000	60 Dokumen	100.000.000	60 Dokumen	500.000.000	Setda - Bagian Hukum	Setda - Bagian Hukum
		4.1.4.1.3.3.32.5	Penanganan Permasalahan Hukum dan Harmonisasi Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	1. Jumlah Permasalahan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang ditangani	na Permasalahan Hukum	na Permasalahan Hukum	27 Permasalahan Hukum	230.000.000	27 Permasalahan Hukum	230.000.000	27 Permasalahan Hukum	230.000.000	27 Permasalahan Hukum	230.000.000	27 Permasalahan Hukum	230.000.000	27 Permasalahan Hukum	1.150.000.000	Setda - Bagian Hukum	Setda - Bagian Hukum
				2. Jumlah Konsep Kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerjasama yang diharmonisasi	na Konsep	na Konsep	30 Konsep		30 Konsep		30 Konsep		30 Konsep		30 Konsep		30 Konsep			
		4.1.4.1.3.3.32.6	Penyuluhan Hukum dan HAM	1. Jumlah Penyuluhan Hukum	na Kali	na Kali	6 Kali	76.000.000	6 Kali	76.000.000	6 Kali	76.000.000	6 Kali	76.000.000	6 Kali	76.000.000	6 Kali	380.000.000	Setda - Bagian Hukum	Setda - Bagian Hukum
				2. Jumlah Laporan Capaian Aksi HAM dan Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM yang disusun	na Dokumen	na Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen			
		4.1.4.1.3.4.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Persen	0 Persen	100 Persen	201.800.000	100 Persen	208.000.000	100 Persen	186.000.000	100 Persen	194.000.000	100 Persen	207.000.000	100 Persen	996.800.000		
		4.1.4.1.3.4.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah Surat yang Dikelola	0 surat	0 surat	1250 surat	9.000.000	1300 surat	11.000.000	1350 surat	12.000.000	1400 surat	13.000.000	1450 surat	14.000.000	6750 surat	59.000.000	Setda - Bagian Perekonomian	Setda - Bagian Perekonomian
				2. Jumlah Arsip yang Dikelola	0 Dokumen	0 Dokumen	300 Dokumen		300 Dokumen		300 Dokumen		300 Dokumen		300 Dokumen		1500 Dokumen			
		4.1.4.1.3.4.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Terlaksana	0 kali	0 kali	55 kali	130.000.000	55 kali	130.000.000	55 kali	130.000.000	55 kali	130.000.000	55 kali	130.000.000	275 kali	650.000.000	Setda - Bagian Perekonomian	Setda - Bagian Perekonomian
				2. Jumlah Rapat Koordinasi yang Diselenggarakan	0 Rapat	0 Rapat	12 Rapat		12 Rapat		12 Rapat		12 Rapat		12 Rapat		60 Rapat			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan				3. Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Terlaksana	0 Kali	0 Kali	100 Kali		100 Kali		100 Kali		100 Kali		100 Kali		500 Kali			
		4.1.4.1.3.4.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0 Paket	0 Paket	1 Paket	54.800.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	45.000.000	5 Paket	219.800.000	Setda - Bagian Perekonomian	Setda - Bagian Perekonomian
				2. Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket			
		4.1.4.1.3.4.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	0 Unit	0 Unit	14 Unit	8.000.000	14 Unit	12.000.000	14 Unit	14.000.000	14 Unit	16.000.000	14 Unit	18.000.000	14 Unit	68.000.000	Setda - Bagian Perekonomian	Setda - Bagian Perekonomian
		4.1.4.1.3.4.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan , Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	0 Persen	0 Persen	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	50.000.000		
		4.1.4.1.3.4.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Jumlah Kegiatan yang Dikelola	0 Kegiatan	0 Kegiatan	11 Kegiatan	10.000.000	11 Kegiatan	10.000.000	11 Kegiatan	10.000.000	11 Kegiatan	10.000.000	11 Kegiatan	10.000.000	11 Kegiatan	50.000.000	Setda - Bagian Perekonomian	Setda - Bagian Perekonomian
				2. Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun	0 Laporan	0 Laporan	132 Laporan		132 Laporan		132 Laporan		132 Laporan		132 Laporan		660 Laporan			
		4.1.4.1.3.4.35	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	1. Persentase Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan	0 Persen	0 Persen	100 Persen	730.000.000	100 Persen	730.000.000	100 Persen	730.000.000	100 Persen	730.000.000	100 Persen	730.000.000	100 Persen	3.650.000.000		
				2. Persentase BUMD yang Berkinerja Baik	0 Persen	0 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
				3. Persentase Peningkatan Sumbangan BUMD pada PAD	0 Persen	0 Persen	12 Persen		12 Persen		12 Persen		12 Persen		12 Persen		12 Persen			
		4.1.4.1.3.4.35.1	Pembinaan BUMD	1. Jumlah BUMD yang Dibina	0 BUMD	0 BUMD	5 BUMD	175.000.000	5 BUMD	175.000.000	5 BUMD	175.000.000	5 BUMD	175.000.000	5 BUMD	175.000.000	5 BUMD	875.000.000	Setda - Bagian Perekonomian	Setda - Bagian Perekonomian
				2. Jumlah Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD yang Diseleksi	0 Orang	0 Orang	3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		15 Orang			
		4.1.4.1.3.4.35.2	Penyusunan Kajian Pengembangan BUMD	1. Jumlah Dokumen Peraturan yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	9 Dokumen	375.000.000	Setda - Bagian Perekonomian	Setda - Bagian Perekonomian
				2. Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan BUMD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		10 Dokumen			
		4.1.4.1.3.4.35.3	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TPAKD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	5 Dokumen	900.000.000	Setda - Bagian Perekonomian	Setda - Bagian Perekonomian
				2. Jumlah Dokumen Rekapitulasi Program Kegiatan Prioritas yang Difasilitasi Melalui Program TJSL dan PKBL	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen			
				3. Jumlah LKM yang Dipersiapkan Untuk Berbadan Hukum dan Berijin	0 LKM	0 LKM	10 LKM		10 LKM		10 LKM		10 LKM		10 LKM		50 LKM			
				4. Jumlah Database SIKP	0 Database	0 Database	1 Database		1 Database		1 Database		1 Database		1 Database		5 Database			
		4.1.4.1.3.4.35.4	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	105.000.000	2 Dokumen	105.000.000	2 Dokumen	105.000.000	2 Dokumen	105.000.000	2 Dokumen	105.000.000	10 Dokumen	525.000.000	Setda - Bagian Perekonomian	Setda - Bagian Perekonomian
				2. Jumlah Forum Penyelenggaraan Posko Terpadu	0 Forum	0 Forum	2 Forum		2 Forum		2 Forum		2 Forum		2 Forum		12 Forum			
		4.1.4.1.3.4.35.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCHT	Jumlah SKPD Pelaksana Pengguna DBHCHT	0 SKPD	0 SKPD	7 SKPD	85.000.000	7 SKPD	85.000.000	7 SKPD	85.000.000	7 SKPD	85.000.000	7 SKPD	85.000.000	7 SKPD	425.000.000	Setda - Bagian Perekonomian	Setda - Bagian Perekonomian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4.1.4.1.3.4.35.6	Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan Peredaran Pupuk dan LPG Bersubsidi	1. Jumlah Kios Pupuk Lengkap yang Dimonitoring 2. Jumlah Pangkalan yang Dimonitoring	0 Kios Pupuk Lengkap (KPL) 0 Pangkalan	0 Kios Pupuk Lengkap (KPL) 0 Pangkalan	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL) 105 Pangkalan	110.000.000 	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL) 105 Pangkalan	110.000.000 	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL) 105 Pangkalan	110.000.000 	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL) 105 Pangkalan	110.000.000 	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL) 105 Pangkalan	110.000.000 	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL) 105 Pangkalan	550.000.000 	Setda - Bagian Perekonomian	Setda - Bagian Perekonomian		
		4.1.4.1.3.5.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na Persen	na Persen	100 Persen	166.000.000	100 Persen	166.000.000	100 Persen	166.000.000	100 Persen	166.000.000	100 Persen	166.000.000	100 Persen	166.000.000	100 Persen	830.000.000		
		4.1.4.1.3.5.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	0 Surat	0 Surat	2000 Surat	9.000.000	2000 Surat	9.000.000	2000 Surat	9.000.000	2000 Surat	9.000.000	2000 Surat	9.000.000	2000 Surat	9.000.000	2000 Surat	45.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda
		4.1.4.1.3.5.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	0 Perjalanan	0 Perjalanan	45 Perjalanan	72.000.000	45 Perjalanan	72.000.000	50 Perjalanan	72.000.000	55 Perjalanan	72.000.000	55 Perjalanan	72.000.000	250 Perjalanan	360.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda		
				2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	0 Perjalanan	0 Perjalanan	35 Perjalanan		35 Perjalanan		40 Perjalanan		40 Perjalanan		40 Perjalanan		190 Perjalanan					
				3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	0 rapat	0 rapat	15 rapat		15 rapat		15 rapat		15 rapat		15 rapat		75 rapat					
		4.1.4.1.3.5.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 Paket	0 Paket	2 Paket	70.000.000	2 Paket	70.000.000	2 Paket	70.000.000	2 Paket	70.000.000	2 Paket	70.000.000	10 Paket	350.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda		
				2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 Paket	0 Paket	3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		15 Paket					
		4.1.4.1.3.5.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah peralatan yang dipelihara	0 Unit	0 Unit	20 Unit	15.000.000	20 Unit	15.000.000	20 Unit	15.000.000	22 Unit	15.000.000	22 Unit	15.000.000	22 Unit	75.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda		
				2. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	0 Unit	0 Unit	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit					
		4.1.4.1.3.5.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na Persen	na Persen	100 Persen	26.400.000	100 Persen	26.400.000	100 Persen	26.400.000	100 Persen	26.400.000	100 Persen	26.400.000	100 Persen	26.400.000	100 Persen	132.000.000		
		4.1.4.1.3.5.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Jumlah kegiatan yang dikelola	0 Kegiatan	0 Kegiatan	12 Kegiatan	6.400.000	12 Kegiatan	6.400.000	12 Kegiatan	6.400.000	12 Kegiatan	6.400.000	12 Kegiatan	6.400.000	12 Kegiatan	6.400.000	12 Kegiatan	32.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda
				2. Jumlah laporan keuangan yang tersusun	0 Laporan	0 Laporan	144 Laporan		144 Laporan		144 Laporan		144 Laporan		144 Laporan		720 Laporan					
		4.1.4.1.3.5.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda
				2. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
		4.1.4.1.3.5.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	50.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda
2. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pertribulan uang tersusun	0 Dokumen			0 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen					
3. Jumlah dokumen jangka menengah yang tersusun	0 Dokumen			0 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen					
4. Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen			na Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					
4.1.4.1.3.5.36	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan,pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	0 Persen	0 Persen	100 Persen	675.000.000	100 Persen	675.000.000	100 Persen	675.000.000	100 Persen	675.000.000	100 Persen	675.000.000	100 Persen	675.000.000	100 Persen	3.375.000.000				
4.1.4.1.3.5.36.1	Administrasi Perencanaan Pembangunan	1. Jumlah pedoman perencanaan pembangunan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	225.000.000	2 Dokumen	225.000.000	2 Dokumen	225.000.000	2 Dokumen	225.000.000	2 Dokumen	225.000.000	2 Dokumen	225.000.000	12 Dokumen	1.125.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda		
		2. Jumlah daftar calon penerima hibah bansos	2 Daftar	2 Daftar	2 Daftar		2 Daftar		2 Daftar		2 Daftar		2 Daftar		2 Daftar		12 Daftar					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4.1.4.1.3.5.36.2	Penyusunan LKPJ	1. Dokumen LKPJ yang disusun 2. Jumlah dokumen LAMJ yang tersusun	1 Dokumen 0 dokumen	1 Dokumen 0 dokumen	1 Dokumen 0 dokumen	200.000.000	1 Dokumen 0 dokumen	200.000.000	1 Dokumen 0 dokumen	200.000.000	1 Dokumen 1 dokumen	200.000.000	1 Dokumen 0 dokumen	200.000.000	6 Dokumen 1 dokumen	1.000.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda
		4.1.4.1.3.5.36.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan	Pelaporan administrasi pembangunan yang tersusun : laporan perkembangan kegiatan APBD, Bankeu dan DAK	28 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	250.000.000	28 Laporan	250.000.000	28 Laporan	250.000.000	28 Laporan	250.000.000	28 Laporan	250.000.000	168 Laporan	1.250.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda
		4.1.4.1.3.5.39	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Kematangan UKPBJ	0 level	3 level	3 level	1.780.000.000	4 level	1.780.000.000	4 level	1.780.000.000	5 level	1.780.000.000	5 level	1.780.000.000	5 level	8.900.000.000		
		4.1.4.1.3.5.39.1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pengadaan barang/jasa yang dilayani	210 -Paket	210 -Paket	210 -Paket	900.000.000	210 -Paket	900.000.000	210 -Paket	900.000.000	210 -Paket	900.000.000	210 -Paket	900.000.000	210 -Paket	4.500.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda
		4.1.4.1.3.5.39.2	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	1. Jumlah lembaga pengadaan barang/jasa yang terbina / teradvokasi	0 Unit	1 Unit	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	4.000.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda
				2. Jumlah pelaku pengadaan barang/jasa yang terbina / teradvokasi	0 Orang	50 Orang	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang			
		4.1.4.1.3.5.39.3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah layanan pengadaan secara elektronik yang dikelola	0 Sistem	0 Sistem	5 Sistem	80.000.000	5 Sistem	80.000.000	6 Sistem	80.000.000	6 Sistem	80.000.000	7 Sistem	80.000.000	7 Sistem	400.000.000	Setda - Bagian Admin Bangda	Setda - Bagian Admin Bangda
		4.1.4.1.3.6.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	120.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	122.000.000	100 Persen	122.000.000	100 Persen	604.000.000		
		4.1.4.1.3.6.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	500 Surat	500 Surat	600 Surat	10.000.000	600 Surat	10.000.000	600 Surat	10.000.000	600 Surat	10.000.000	600 Surat	10.000.000	600 Surat	50.000.000	Setda - Bagian Kesra	Setda - Bagian Kesra
		4.1.4.1.3.6.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	250 Perjalanan	300 Perjalanan	350 Perjalanan	87.000.000	400 Perjalanan	87.000.000	400 Perjalanan	87.000.000	500 Perjalanan	87.000.000	500 Perjalanan	87.000.000	500 Perjalanan	435.000.000	Setda - Bagian Kesra	Setda - Bagian Kesra
				2. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	50 Perjalanan	50 Perjalanan	60 Perjalanan		60 Perjalanan		60 Perjalanan		60 Perjalanan		60 Perjalanan		60 Perjalanan			
				3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	7 Rapat	9 Rapat	9 Rapat		9 Rapat		9 Rapat		9 Rapat		9 Rapat		9 Rapat			
		4.1.4.1.3.6.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	3 Paket	NA Paket	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	75.000.000	Setda - Bagian Kesra	Setda - Bagian Kesra
		4.1.4.1.3.6.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang yang dikelola	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000	4 Paket	8.000.000	4 Paket	8.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	44.000.000	Setda - Bagian Kesra	Setda - Bagian Kesra
		4.1.4.1.3.6.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perabgkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	12.000.000	100 Persen	14.000.000	100 Persen	14.000.000	100 Persen	14.000.000	100 Persen	14.000.000	100 Persen	68.000.000		
		4.1.4.1.3.6.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	68.000.000	Setda - Bagian Kesra	Setda - Bagian Kesra
		4.1.4.1.3.6.34	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	NA Persen	100 Persen	100 Persen	2.800.832.000	100 Persen	2.800.832.000	100 Persen	2.800.832.000	100 Persen	2.800.832.000	100 Persen	2.800.832.000	100 Persen	14.004.160.000		
		4.1.4.1.3.6.34.1	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang kesejahteraan sosial	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	184.832.000	4 Dokumen	184.832.000	4 Dokumen	184.832.000	4 Dokumen	184.832.000	4 Dokumen	184.832.000	22 Dokumen	924.160.000	Setda - Bagian Kesra	Setda - Bagian Kesra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4.1.4.1.3.6.34.2	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah pelaksanaan kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang perlindungan perempuan dan anak	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	31.000.000	4 Dokumen	31.000.000	4 Dokumen	31.000.000	4 Dokumen	31.000.000	4 Dokumen	31.000.000	22 Dokumen	155.000.000	Setda - Bagian Kesra	Setda - Bagian Kesra
		4.1.4.1.3.6.34.3	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya	1. Jumlah kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang agama, pendidikan dan budaya 2. Jumlah Bulan Pengelolaan Islamic Center	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	2.585.000.000	9 Dokumen	2.585.000.000	9 Dokumen	2.585.000.000	9 Dokumen	2.585.000.000	9 Dokumen	2.585.000.000	50 Dokumen	12.925.000.000	Setda - Bagian Kesra	Setda - Bagian Kesra
				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,25 Angka 1-100	83,50 Angka 1-100	83,75 Angka 1-100	2.042.349.000	84,00 Angka 1-100	2.042.349.000	84,25 Angka 1-100	2.042.349.000	84,50 Angka 1-100	2.042.349.000	85,00 Angka 1-100	2.042.349.000	85,00 Angka 1-100	10.211.745.000		
		4.1.4.1.3.7.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na Persen	na Persen	100 Persen	375.300.000	100 Persen	375.300.000	100 Persen	375.300.000	100 Persen	375.300.000	100 Persen	375.300.000	100 Persen	1.876.500.000		
		4.1.4.1.3.7.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah surat yang dikelola 2. Jumlah bahan bacaan yang disediakan 3. Jumlah buku himpunan klipng yang disusun	600 surat 468 eksemplar 12 buku	650 surat 468 eksemplar 12 buku	700 surat 468 eksemplar 12 buku	113.800.000	750 surat 468 eksemplar 12 buku	113.800.000	800 surat 468 eksemplar 12 buku	113.800.000	850 surat 468 eksemplar 12 buku	113.800.000	900 surat 468 eksemplar 12 buku	113.800.000	900 surat 468 eksemplar 12 buku	569.000.000	Setda - Bagian Humprot	Setda - Bagian Humprot
		4.1.4.1.3.7.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana 2. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan 3. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	90 Perjalanan 5 rapat 600 perjalanan	90 Perjalanan 5 rapat 600 perjalanan	90 Perjalanan 5 rapat 600 perjalanan	177.000.000	90 Perjalanan 5 rapat 600 perjalanan	177.000.000	90 Perjalanan 5 rapat 600 perjalanan	177.000.000	90 Perjalanan 5 rapat 600 perjalanan	177.000.000	90 Perjalanan 5 rapat 600 perjalanan	177.000.000	90 Perjalanan 5 rapat 600 perjalanan	885.000.000	Setda - Bagian Humprot	Setda - Bagian Humprot
		4.1.4.1.3.7.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	na paket 2 paket	1 paket 2 paket	1 paket 2 paket	68.000.000	1 paket 2 paket	68.000.000	1 paket 2 paket	68.000.000	1 paket 2 paket	68.000.000	1 paket 2 paket	68.000.000	1 paket 2 paket	340.000.000	Setda - Bagian Humprot	Setda - Bagian Humprot
		4.1.4.1.3.7.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	15 peralatan	15 peralatan	15 peralatan	16.500.000	15 peralatan	16.500.000	15 peralatan	16.500.000	15 peralatan	16.500.000	15 peralatan	16.500.000	15 peralatan	82.500.000	Setda - Bagian Humprot	Setda - Bagian Humprot
		4.1.4.1.3.7.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na Persen	na Persen	100 Persen	17.000.000	100 Persen	17.000.000	100 Persen	17.000.000	100 Persen	17.000.000	100 Persen	17.000.000	100 Persen	85.000.000		
		4.1.4.1.3.7.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	19 kegiatan	20 kegiatan	8 kegiatan	17.000.000	8 kegiatan	17.000.000	8 kegiatan	17.000.000	8 kegiatan	17.000.000	8 kegiatan	17.000.000	8 kegiatan	85.000.000	Setda - Bagian Humprot	Setda - Bagian Humprot
		4.1.4.1.3.7.40	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	Cakupan Kinerja Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	0 Persen	0 Persen	100 Persen	1.650.049.000	100 Persen	1.650.049.000	100 Persen	1.650.049.000	100 Persen	1.650.049.000	100 Persen	1.650.049.000	100 Persen	8.250.245.000		
		4.1.4.1.3.7.40.1	Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi	1. Jumlah dokumen analisis pemberitaan, naskah pidato, dan dokumentasi yang disusun 2. Sistem Aplikasi Analisis Pemberitaan	NA Dokumen na Paket	NA Dokumen na Paket	24 Dokumen 1 Paket	196.072.500	24 Dokumen 0 Paket	196.072.500	24 Dokumen 0 Paket	196.072.500	24 Dokumen 0 Paket	196.072.500	24 Dokumen 0 Paket	196.072.500	120 Dokumen 1 Paket	980.362.500	Setda - Bagian Humprot	Setda - Bagian Humprot
		4.1.4.1.3.7.40.2	Peliputan, Editorial, dan Publikasi	Jumlah dokumen peliputan, editorial, dan publikasi yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	66 Dokumen	1.250.101.500	66 Dokumen	1.250.101.500	66 Dokumen	1.250.101.500	66 Dokumen	1.250.101.500	66 Dokumen	1.250.101.500	66 Dokumen	6.250.507.500	Setda - Bagian Humprot	Setda - Bagian Humprot
		4.1.4.1.3.7.40.3	Layanan Keprotokolan	Jumlah Layanan Keprotokolan	NA Kali	120 Kali	120 Kali	203.875.000	120 Kali	203.875.000	120 Kali	203.875.000	120 Kali	203.875.000	120 Kali	203.875.000	120 Kali	1.019.375.000	Setda - Bagian Humprot	Setda - Bagian Humprot

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kesekretariatan daerah	4.1.4.1.3.8.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	6.442.705.000	100 persen	6.369.081.000	100 persen	6.369.081.000	100 persen	6.369.081.000	100 persen	6.369.081.000	100 persen	31.919.029.000		
		4.1.4.1.3.8.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah surat yang dikelola	5000 surat	5000 surat	5000 surat	180.050.000	5000 surat	180.050.000	5000 surat	180.050.000	5000 surat	180.050.000	5000 surat	180.050.000	35000 surat	900.250.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
				2. Jumlah pengelolaan agenda surat menyurat Pimpinan Daerah	na agenda	22 agenda	22 agenda		22 agenda		22 agenda		22 agenda		22 agenda		22 agenda			
				3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi persuratan	12 buku	12 buku	12 buku		12 buku		12 buku		12 buku		12 buku		12 buku			
		4.1.4.1.3.8.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	na kali	277 kali	277 kali	779.000.000	277 kali	779.000.000	277 kali	779.000.000	277 kali	779.000.000	277 kali	779.000.000	277 kali	3.895.000.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
				2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	770 kali	860 kali	860 kali		860 kali		860 kali		860 kali		860 kali		860 kali			
		4.1.4.1.3.8.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	na paket	3 paket	9 paket	246.090.000	2 paket	246.090.000	3 paket	246.090.000	5 paket	246.090.000	3 paket	246.090.000	3 paket	1.230.450.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
				2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	na paket	4 paket	12 paket		7 paket		7 paket		5 paket		5 paket		5 paket			
				3. Jumlah aset dikelola	9201 buah	6500 buah	6500 buah		6750 buah		7100 buah		7350 buah		7550 buah		7550 buah			
		4.1.4.1.3.8.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah	1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	9 gedung	9 gedung	9 gedung	2.504.673.000	9 gedung	2.504.673.000	9 gedung	2.504.673.000	9 gedung	2.504.673.000	9 gedung	2.504.673.000	9 gedung	12.523.365.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
				2. Jumlah rekening tagihan	3 rekening	3 rekening	3 rekening		3 rekening		3 rekening		3 rekening		3 rekening		3 rekening			
		4.1.4.1.3.8.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah peralatan yang dipelihara	8 macam	8 macam	8 macam	1.356.982.000	8 macam	1.356.982.000	8 macam	1.356.982.000	8 macam	1.356.982.000	8 macam	1.356.982.000	8 macam	6.784.910.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
				2. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	40 jenis	44 jenis	44 jenis		44 jenis		44 jenis		44 jenis		44 jenis		44 jenis			
				3. Jumlah kendaraan yang dipelihara	88 buah	90 buah	90 buah		90 buah		90 buah		90 buah		90 buah		90 buah			
		4.1.4.1.3.8.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 paket	2 paket	2 paket	493.624.000	2 paket	420.000.000	2 paket	420.000.000	2 paket	420.000.000	2 paket	420.000.000	2 paket	2.173.624.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
		4.1.4.1.3.8.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	22 orang	22 orang	22 orang	882.286.000	22 orang	882.286.000	22 orang	882.286.000	22 orang	882.286.000	22 orang	882.286.000	22 orang	4.411.430.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
		4.1.4.1.3.8.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	224.516.000	100 Persen	224.516.000	100 Persen	224.516.000	100 Persen	224.516.000	100 Persen	224.516.000	100 Persen	1.122.580.000		
		4.1.4.1.3.8.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Jumlah kegiatan yang dikelola	29 kegiatan	30 kegiatan	14 kegiatan	224.516.000	14 kegiatan	224.516.000	14 kegiatan	224.516.000	14 kegiatan	224.516.000	14 kegiatan	224.516.000	14 kegiatan	1.122.580.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
				2. Jumlah pengelolaan administrasi keuangan bagian	8 bagian	8 bagian	9 bagian		9 bagian		9 bagian		9 bagian		9 bagian		9 bagian			
		4.1.4.1.3.8.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	na persen	100 persen	100 persen	3.962.199.000	100 persen	3.962.199.000	100 persen	3.835.687.000	100 persen	3.901.687.000	100 persen	3.949.687.000	100 persen	19.611.459.000		
		4.1.4.1.3.8.16.10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan - kegiatan pemerintah daerah	na kali, buah, meter, paket.	29488 kali, buah, meter, paket.	29.488 kali, buah, meter, paket.	483.560.000	29.488 kali, buah, meter, paket.	483.560.000	29.488 kali, buah, meter, paket.	483.560.000	29.488 kali, buah, meter, paket.	483.560.000	29.488 kali, buah, meter, paket.	483.560.000	29.488 kali, buah, meter, paket.	2.417.800.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
		4.1.4.1.3.8.16.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan	1. Jumlah/ macam pengadaan peralatan rumah jabatan	na paket	12 paket	7 paket	265.512.000	5 paket	265.512.000	3 paket	139.000.000	4 paket	205.000.000	3 paket	253.000.000	3 paket	1.128.024.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
				2. Jumlah/ macam pengadaan perlengkapan rumah jabatan	na paket	na paket	5 paket		5 paket		3 paket		3 paket		2 paket		2 paket			
		4.1.4.1.3.8.16.12	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan	1. Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	2 paket	2 paket	2 paket	292.031.000	2 paket	292.031.000	2 paket	292.031.000	2 paket	292.031.000	2 paket	292.031.000	2 paket	1.460.155.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2. Jumlah/ macam rehabilitasi rumah jabatan	2 paket	2 paket	2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket			
		4.1.4.1.3.8.16.13	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	5 buah	4 buah	4 buah	382.216.000	4 buah	382.216.000	4 buah	382.216.000	4 buah	382.216.000	4 buah	382.216.000	4 buah	1.911.080.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
		4.1.4.1.3.8.16.14	Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Jumlah personil yang disediakan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	8 orang	7 orang	7 orang	1.086.750.000	7 orang	1.086.750.000	7 orang	1.086.750.000	7 orang	1.086.750.000	7 orang	1.086.750.000	7 orang	5.433.750.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
				2. Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/ WKDH	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
				3. Jumlah koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan KDH/ WKDH.	na kali	55 kali	60 kali		70 kali		75 kali		80 kali		85 kali		85 kali			
				4. Jumlah cinderamata dan karangan bunga yang tersedia selama satu tahun	48 buah/paket/set	60 buah/paket/set	326 buah/paket/set		326 buah/paket/set		326 buah/paket/set		326 buah/paket/set		326 buah/paket/set		326 buah/paket/set			
				5. Jumlah/ macam pengadaan pakaian dinas KDH/ WKDH	37 stel, buah, pasang	56 stel, buah, pasang	56 stel, buah, pasang		56 stel, buah, pasang		56 stel, buah, pasang		56 stel, buah, pasang		56 stel, buah, pasang		56 stel, buah, pasang			
				6. Jumlah kursus/ diklat yang diikuti KDH/ WKDH	4 kali	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali			
		4.1.4.1.3.8.16.15	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu pemerintah daerah	na dos/paket	na dos/paket	24.384 dos/paket	1.452.130.000	24.384 dos/paket	1.452.130.000	24.384 dos/paket	1.452.130.000	24.384 dos/paket	1.452.130.000	24.384 dos/paket	1.452.130.000	24.384 dos/paket	7.260.650.000	Setda - Bagian Umum	Setda - Bagian Umum
	Jumlah								23.653.569.000		23.548.145.000		23.412.813.000		23.488.813.000		23.578.825.000		117.682.165.000	

Tabel 7.3
CASCADING RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

RPJMD KABUPATEN MAGELANG 2019-2024					RPJMD & RENSTRA			RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH									
VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SASARAN RPJMD/TUJUAN SKPD	INDIKATOR SASARAN/ TUJUAN	FORMULA	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	FORMULA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		
														Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi serta Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1. Jumlah Dokumen Propemperda 2. Jumlah dokumen Raperda 3. Jumlah Raperda yang dibahas di tingkat DPRD		
											Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas Persentase permasalahan hukum yang didampingi	1. Jumlah Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah yang disusun 2. Jumlah Keputusan Bupati yang disusun 3. Jumlah Keputusan Kepala SKPD yang disusun	Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan JDIH Penanganan Permasalahan Hukum dan Harmonisasi Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama Penyuluhan Hukum dan HAM	1. Jumlah Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah yang disusun 2. Jumlah Keputusan Bupati/ Kepala SKPD yang disusun Jumlah dokumen kajian dan evaluasi Peraturan perundang-undangan yang disusun Jumlah Dokumen Hukum yang dikelola 1. Jumlah Permasalahan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang ditangani 2. Jumlah Konsep Kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerjasama yang diharmonisasi 1. Jumlah Penyuluhan Hukum 2. Jumlah Laporan Capaian Aksi HAM dan Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM yang disusun		
														Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1. Jumlah kecamatan yang melaksanakan paten 2. jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya 1. Jumlah Dokumen LPPD 2. Jumlah Dokumen Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah 3. Jumlah Dokumen Unsur Rupabumi yang Nama-namanya Telah Dibakukan 4. Jumlah Desk Pilkada 5. Jumlah Pelantikan KDH/ WKDH 6. Jumlah Desk Pemilu 7. Jumlah Laporan SPM 8. Jumlah koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan		
											Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	Persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan	(Jumlah Dokumen perumusan dan pengendalian yang disusun/Jumlah Dokumen perumusan dan pengendalian yang seharusnya disusun)*100		1. Jumlah dokumen Kerjasama Antar Daerah		

